

**IDENTITAS ACEH DALAM IMAJINASI MASYARAKAT SIMEULUE DI
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ARNILA

NIM. 220801047



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

TAHUN 2025/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Arnila

NIM : 220801047

Tempat/Tanggal Lahir : Seneubuk, 24 November 2004

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Identitas Aceh Dalam Imajinasi Diaspora Lokal: Studi Masyarakat Simeulue Di Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 19 November 2025

Yang menyatakan,



Arnila

NIM. 220801047

LEMBAR PENGESAHAN

**IDENTITAS ACEH DALAM IMAJINASI MASYARAKAT SIMEULUE DI
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Di Ajukan Oleh:

ARNILA

NIM.220801047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Di Setujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing

Dr. Muhammad Thalal,Lc,M.Si.,M.Ed

NIP. 197810162008011011

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH IDENTITAS ACEH DALAM
IMAJINASI MASYARAKAT SIMEULUE DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

ARNILA

NIM.220801047

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UTN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam
Ilmu Politik Pada Hari/Tanggal: Kamis/26 Februari 2026

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Sekretaris



Shafivur Rahman S.A.P
NIP.

Penguji I



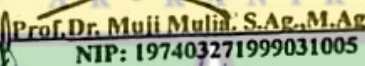
Dr. Bustami, S.Ag., M.Hum
NIP. 197211262005011002

Penguji II



Aklima M.A.
NIP. 198810062019032009

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UTN Ar-Raniry



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP: 197403271999031005



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, serta jalan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan ini. Dalam perjalanan menempuh pendidikan ini, tidak sedikit rintangan dan keterbatasan terutama dalam hal ekonomi. Dahulu penulis sempat berpikir bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hanyalah angan-angan yang sulit terwujud. Namun, Allah Maha Pengatur segala sesuatu. Dengan jalan-Nya yang penuh kejutan, selangkah demi selangkah, Allah mempermudah, membuka pintu-pintu rezeki, dan mempertemukan dengan orang-orang baik yang menjadi penopang perjalanan ini. Maka, terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan bukti nyata pertolongan Allah di setiap waktu.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penghargaan dan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dengan penuh cinta dan penghargaan yang tulus, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Adnan dan Ibunda Lawati. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah

putus, keikhlasan dalam setiap pengorbanan, kerja keras yang tidak terlihat namun dirasakan, serta keyakinan yang Ayah dan Ibu tanamkan bahwa penulis mampu menapaki jalan pendidikan ini, meski sempat diragukan oleh sebagian orang. Kalian adalah alasan utama di balik setiap langkah yang saya ambil, setiap doa yang saya panjatkan, dan setiap harapan yang saya perjuangkan. Terima kasih telah menjadi pelabuhan paling teduh di kala lelah, dan cahaya paling hangat saat dunia terasa gelap. Doa-doa kalian adalah kekuatan yang tak pernah padam, dan cinta kalian adalah rumah yang selalu saya rindukan. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan setiap kalimat dalam karya ini untuk Ayah dan Ibu, sebagai tanda cinta dan terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan kasih yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan kalian dengan surga yang paling indah.

2. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada abang-abang dan kakak-kakak tercinta Adriman, Ardeni, Arnadewi (Almarhumah), Ardonistori, Ardion, Ardiani, Kamaida, Izan Gunawan, Fiska Rahayu, Ruqayyah. Yang telah menjadi penopang dalam keadaan sulit. Walaupun ekonomi keluarga kecil mereka juga pas-pasan, namun tetap menyisihkan apa yang dimiliki demi membantu penulis bertahan di perantauan. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan berlipat ganda untuk kalian semua.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

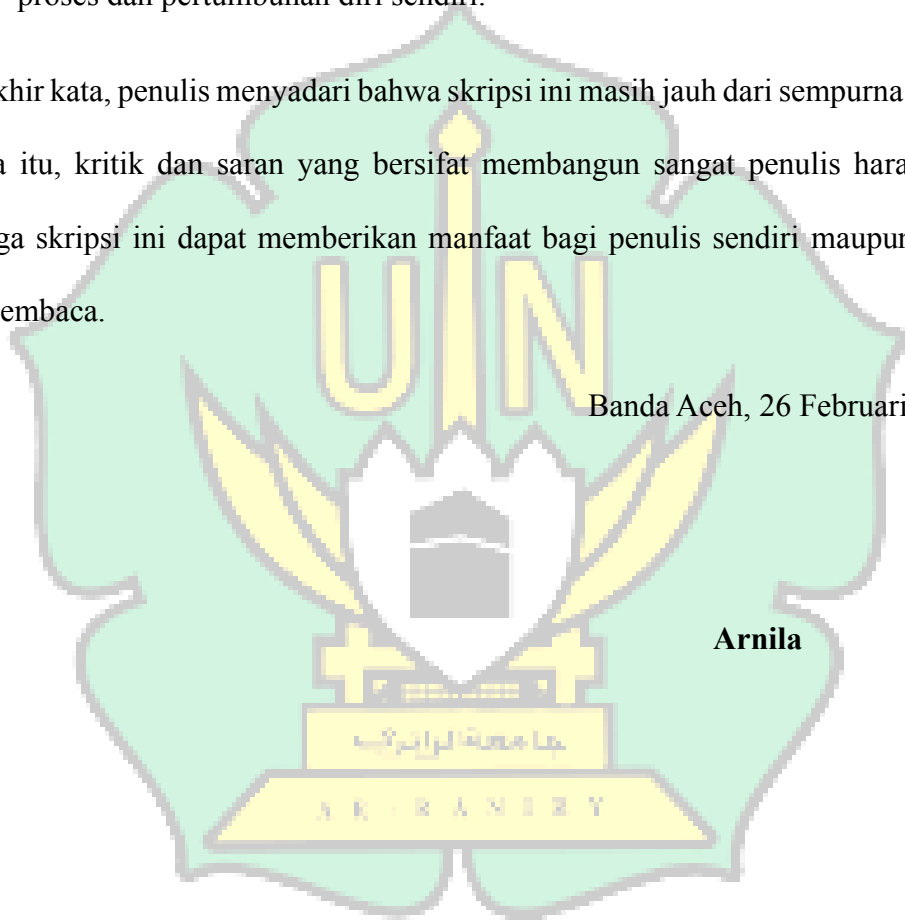
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, dan Bapak Arif Akbar, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
6. Bapak Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan arahan yang bijaksana telah membantu dan mempermudah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah Bapak curahkan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu, bimbingan yang bermanfaat bagi penulis, dan layanan akademik selama masa perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan informasi yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Arnila. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba

dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana you not found anyone people can help your life, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Banda Aceh, 26 Februari 2026

Arnila



ABSTRAK

Masyarakat Simeulue di Banda Aceh hidup di persimpangan dua lapis identitas: identitas lokal yang mereka bawa dari kampung halaman, dan narasi ke-Aceh-an yang sedang direkonstruksi pasca MoU Helsinki 2005. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana masyarakat Simeulue memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian yang secara khusus menelusuri pengalaman kelompok etnis kepulauan seperti Simeulue dalam narasi ke-Aceh-an yang sedang dibangun ulang pasca perdamaian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh pasca MoU Helsinki? Teori yang digunakan adalah komunitas terbayangkan (imagined communities) Benedict Anderson, yang menjelaskan bahwa komunitas terbentuk melalui imajinasi kolektif yang dibangun bersama melalui narasi, simbol, dan pengalaman yang dibagi bersama. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif-interpretatif dengan wawancara mendalam yang dianalisis menggunakan analisis tematik induktif Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Simeulue membangun rasa ke-Aceh-an melalui kesamaan nilai keislaman, adat, dan sejarah kolektif bukan melalui keseragaman bahasa atau simbol budaya. Mereka mengakui diri sebagai bagian dari Aceh, namun merasakan jarak simbolik karena narasi yang dominan belum sepenuhnya menyertakan pengalaman mereka. Dalam keseharian, identitas dinegosiasikan secara aktif melalui adaptasi di ruang publik dan pemeliharaan bahasa serta tradisi Simeulue di ruang komunal. Kesimpulannya, identitas Aceh bersifat majemuk dan terus dinegosiasikan, dan penelitian ini memperluas konsep komunitas terbayangkan Anderson ke dalam konteks identitas intra-daerah pascakonflik.

Kata Kunci: *Identitas Aceh, Komunitas Terbayang, Masyarakat Simeulue, Negosiasi Identitas, Pasca Mou Helsinki*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 8 |
| BAB II | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2 Kerangka Konseptual..... | 17 |
| 2.2.1 Identitas..... | 18 |
| 2.2.2 Identitas Etnis..... | 19 |
| 2.2.3 Negosiasi Identitas | 20 |
| 2.3 Landasan Teori..... | 21 |
| 2.3.1 Komunitas Terbayangkan (Imagined Communities) Benedict Anderson..... | 21 |
| 2.4 Kerangka Berpikir..... | 26 |

| | |
|---|----|
| BAB III | 29 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 29 |
| 3.1 Lokasi Penelitian | 29 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 30 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.4 Informan Penelitian | 32 |
| 3.5 Sumber Data | 34 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 35 |
| 3.7 Keabsahan Data | 37 |
| BAB IV | 41 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 41 |
| 4.1.1 Pemaknaan Identitas Aceh oleh Masyarakat Simeulue | 41 |
| 4.1.2 Bahasa sebagai Ruang Adaptasi dan Negosiasi Identitas | 43 |
| 4.1.3 Praktik Keagamaan dan Adat sebagai Jembatan Identitas | 45 |
| 4.1.4 Pandangan terhadap Simbol-Simbol Resmi Ke Aceh-an | 47 |
| 4.1.5 Solidaritas Komunitas Simeulue di Banda Aceh | 49 |
| 4.1.6 Memori Kolektif tentang Konflik dan Perdamaian | 50 |
| 4.2 Pembahasan | 52 |
| 4.2.1 Konstruksi Identitas Aceh dalam Imajinasi Masyarakat Simeulue 52 | |
| 4.2.2 Negosiasi Identitas dalam Kehidupan Sosial Aceh Pascakonflik | 54 |
| 4.2.3 Memperluas Anderson: Identitas Intra-Regional dan Batas Etnis dalam Komunitas Terbayangkan | 57 |
| BAB V | 62 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1 Kesimpulan | 62 |
| 5.2 Saran | 65 |
| 5.2.1 Saran bagi peneliti selanjutnya | 65 |
| 5.2.2 Saran bagi pemerintah daerah Aceh | 66 |
| 5.2.3 Saran bagi masyarakat Simeulue | 66 |

| | |
|---|----|
| 5.2.4 Saran bagi masyarakat Aceh secara umum..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 72 |
| DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA..... | 76 |



DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Kerangka Berpikir | 20 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian | 26 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1 Dokumentasi penelitian..... | 58 |
|--------------------------------------|----|



Daftar Lampiran

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 . Surat Keputusan dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Pembimbing skripsi | 56 |
| Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan | 57 |
| Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas merupakan konstruksi sosial yang tidak bersifat tetap, melainkan terus terbentuk dan berubah melalui proses interaksi antar manusia, pergeseran budaya, serta dinamika politik yang melingkupinya. Dalam masyarakat yang majemuk, identitas tidak semata-mata menyangkut siapa diri seseorang, tetapi juga bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam kelompok yang lebih besar. Benedict Anderson menyebut kelompok besar semacam itu sebagai komunitas terbayangkan (*imagined community*), yakni sebuah komunitas yang anggota-anggotanya tidak saling mengenal secara langsung, tetapi diikat oleh imajinasi bersama yang terbangun melalui bahasa, simbol, dan narasi yang mereka miliki bersama.¹ Dalam komunitas terbayangkan, rasa keterikatan itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk secara aktif melalui berbagai medium seperti media, pendidikan, simbol resmi, serta pengalaman kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²

Aceh sebagai sebuah provinsi menyimpan keragaman etnis yang sering kali tidak tampak dalam narasi resmi tentang daerah ini. Selain etnis Aceh yang mendiami wilayah pesisir, terdapat pula etnis Gayo di dataran tinggi, etnis Alas dan Tamiang di wilayah selatan dan timur, etnis Aneuk Jamee di pesisir barat-selatan,

¹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983), hlm. 6.

² *Ibid*, hlm.15

serta etnis Simeulue yang mendiami kepulauan di Samudera Hindia.³ Masing-masing kelompok etnis ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Masyarakat Simeulue, misalnya, menggunakan bahasa Devayan dan Sigulai dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tradisi smong sebagai kearifan lokal dalam menghadapi bencana alam, serta sistem adat dan kekerabatan yang berciri khas tersendiri.⁴ Keragaman ini menjadikan Aceh bukan sekadar entitas tunggal, melainkan ruang sosial yang dihuni oleh banyak komunitas dengan latar belakang yang beragam. Selama hampir tiga dekade, narasi tentang identitas Aceh banyak dibentuk oleh konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam periode tersebut, identitas Aceh dikonstruksi dalam kerangka perjuangan dan perlawanan. Simbol-simbol seperti bendera bulan bintang GAM, narasi kerajaan Aceh, serta bahasa Aceh menjadi penanda kolektif yang memperkuat solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik.⁵ Konstruksi identitas semacam ini terutama mengakar kuat di wilayah pesisir timur Aceh yang menjadi basis GAM. Sementara itu, kelompok-kelompok etnis lain yang secara geografis berada jauh dari pusat konflik, termasuk masyarakat kepulauan Simeulue, belum tentu memiliki pengalaman yang sama terhadap narasi perjuangan tersebut.

³ Syamsuddin Ishak, "Keberagaman Etnis di Aceh," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 22-23.

⁴ M. Adli Abdullah dkk, *Selama Kite Senlambat: Adat Simeulue dalam Perspektif Budaya dan Hukum* (Banda Aceh Syiah Knala University Press, 2010), hlm. 5.

⁵ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford: Stanford University Press, 2009), hlm. 21

Dengan sendirinya, cara mereka membayangkan identitas Aceh pun dapat berbeda dengan kelompok yang paling banyak terlibat dalam konflik.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik bersenjata dan membuka babak baru bagi Aceh.⁶ Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang disahkan pada tahun 2006, Aceh mendapatkan otonomi khusus yang mencakup hak membentuk partai lokal, menerapkan syariat Islam secara formal, serta mengelola sumber daya alam secara lebih mandiri.⁷ Dalam konteks inilah proses rekonstruksi identitas Aceh berlangsung secara lebih terstruktur. Simbol-simbol yang sebelumnya digunakan dalam konteks perlawanan, seperti bendera bulan bintang GAM, diadopsi menjadi simbol resmi pemerintahan Aceh. Hymne Aceh yang menggunakan bahasa Aceh pun mulai dikumandangkan dalam berbagai kesempatan resmi sebagai representasi identitas daerah. Proses ini menunjukkan bahwa komunitas terbayangkan Aceh sedang dibangun ulang dalam kerangka perdamaian, keistimewaan, dan nilai-nilai Islam.

Penggunaan simbol-simbol tersebut menimbulkan persoalan representasi yang perlu dikaji secara serius. Bahasa Aceh yang digunakan dalam Hymne Aceh, misalnya, bukanlah bahasa yang dikenal oleh seluruh warga Aceh.⁸ Masyarakat Gayo menggunakan bahasa Gayo, masyarakat Aneuk Jamee menggunakan bahasa Jamee, dan masyarakat Simeulue menggunakan bahasa Devayan dan Sigulai dalam

⁶ Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, 15 Agustus 2005.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1

⁸ Anderson, *Imagined Communities*, hlm 7.

kehidupan sehari-hari Ketika bahasa Aceh dijadikan satu-satunya bahasa dalam simbol resmi daerah, terjadi penyempitan representasi yang menempatkan kelompok-kelompok etnis lain pada posisi pinggiran dalam imajinasi tentang komunitas Aceh. Dalam kerangka Anderson, hal ini berdampak pada sejauh mana anggota kelompok tersebut merasa menjadi bagian dari komunitas terbayangkan yang sedang dibentuk.

Selain bahasa, Islam kerap ditempatkan sebagai perekat utama identitas Aceh. Aceh dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah" yang mencerminkan kuatnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Penerapan syariat Islam secara formal pasca MoU semakin memperkuat posisi Islam sebagai pilar identitas ke-Aceh-an.⁹ Namun perlu dicatat bahwa praktik keagamaan dan adat istiadat di masing-masing kelompok etnis tidak selalu berwajah seragam. Masyarakat Simeulue, meskipun mayoritas beragama Islam, memiliki tradisi lokal yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai keislaman. Tradisi smong, misalnya, merupakan kearifan lokal yang secara turun-temurun menjadi panduan masyarakat Simeulue dalam menghadapi bencana alam, khususnya tsunami.¹⁰ Tradisi ini mencerminkan bahwa identitas keislaman di Simeulue tidak terlepas dari akar budaya lokal yang telah lama mengakar di tengah masyarakat.

Posisi Simeulue sebagai kepulauan yang terpisah dari daratan Aceh membuatnya rentan terhadap marginalisasi dalam narasi utama tentang Aceh.

⁹ Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh* (Banda Aceh: ICAIOS, 2010), hlm. 47.

¹⁰ Nur Aini, "Smong. Kearifan Lokal Masyarakat Simeulue dalam Menghadapi Bencana Tsunami," *Jurnal Disaster Risiko Bencana*, Vol 2. No. 1 (2011), hlm. 13

Minimnya liputan media terhadap kehidupan masyarakat kepulauan, keterbatasan akses infrastruktur, serta jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi menjadikan Simeulue seringkali tidak tampak dalam gambaran umum tentang Aceh.¹¹ Secara administratif, masyarakat Simeulue adalah bagian dari provinsi Aceh dan tunduk pada seluruh peraturan daerah yang berlaku. Namun ketika narasi tentang Aceh dibangun di atas simbol-simbol yang tidak berasal dari tradisi mereka, masyarakat Simeulue berada dalam posisi yang tidak mudah mereka adalah bagian dari Aceh secara hukum, tetapi belum tentu sepenuhnya merasa menjadi bagian dari Aceh secara imajinatif.

Kondisi tersebut semakin menarik untuk dikaji melalui keberadaan masyarakat Simeulue yang kini tinggal dan menetap di Banda Aceh. Berbagai faktor mendorong migrasi warga Simeulue ke ibu kota provinsi, mulai dari keperluan pendidikan, pekerjaan, hingga akses layanan publik yang lebih mudah dijangkau.¹² Mereka yang menetap di Banda Aceh ini berada dalam situasi yang khas sehari-hari mereka hidup di tengah ruang sosial yang menjadi pusat berlangsungnya konstruksi identitas Aceh, sekaligus membawa serta identitas kultural dari kampung halaman yang memiliki kekhasan tersendiri. Proses negosiasi identitas yang terjadi dalam kehidupan mereka mencerminkan bagaimana seseorang menempatkan diri dalam komunitas yang lebih besar. Dalam kerangka Anderson, hal inilah yang disebut sebagai proses pembayangan atas sebuah komunitas terbayangkan.¹³

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, Simeulue dalam Angka 2023 (Sinabang: BPS Simeulue, 2023), hlm. 19.

¹² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islamic Law in Contemporary Southeast Asia: A Study of the Implementation of Shari'ah in Aceh (Banda Aceh: AK Group, 2007), hlm. 102.

¹³ Anderson, Imagined Communities, hlm. 36.

Kajian tentang identitas masyarakat Simeulue dalam konteks ke-Aceh-an masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tentang Aceh selama ini lebih memusatkan perhatian pada etnis Aceh sebagai kelompok mayoritas, atau pada dinamika konflik dan perdamaian di daratan Aceh. Kelompok-kelompok etnis yang berada di pinggiran geografis maupun demografis, seperti masyarakat Simeulue, belum banyak mendapat perhatian dalam studi sosial budaya dan politik.¹⁴ Padahal, memahami cara pandang kelompok-kelompok ini terhadap identitas ke-Aceh-an sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana komunitas terbayangkan Aceh bekerja dalam kenyataan sosialnya yang beragam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana masyarakat Simeulue yang tinggal di Banda Aceh membayangkan identitas Aceh dan menempatkan diri mereka dalam komunitas tersebut. Dengan menggunakan kerangka konsep komunitas terbayangkan dari Benedict Anderson, penelitian ini menelusuri sejauh mana narasi, simbol, dan pengalaman kolektif yang membentuk identitas Aceh pasca MoU Helsinki dirasakan relevan dan bermakna bagi masyarakat Simeulue di Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian identitas di Aceh, sekaligus memberi masukan bagi upaya membangun ke-Aceh-an yang lebih inklusif dan merangkul seluruh keragaman yang ada.

¹⁴ Anderson, *Imagined Communities*, hlm 44.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri mereka dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri mereka dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki, dengan mengkaji pengalaman mereka melalui aspek bahasa dan simbol budaya, praktik keagamaan dan adat, serta memori kolektif tentang konflik dan perdamaian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian identitas di Aceh, khususnya dengan menghadirkan perspektif masyarakat Simeulue yang bermukim di Banda Aceh sebuah sudut pandang yang belum banyak diangkat dalam kajian tentang Aceh yang selama ini lebih banyak berpusat pada dinamika konflik dan narasi kelompok mayoritas di daratan. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa identitas keacehan bersifat majemuk dan terus dinegosiasikan oleh berbagai kelompok etnis, bukan sesuatu yang seragam dan sudah selesai terbentuk.

Secara teoritis, penelitian ini juga memperluas penerapan konsep komunitas terbayangkan Benedict Anderson dalam konteks yang lebih spesifik, yakni bagaimana kelompok etnis minoritas di wilayah kepulauan memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas daerah yang dibangun pasca konflik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi studi Aceh, tetapi juga bagi kajian identitas daerah di Indonesia yang memiliki keragaman etnis serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Aceh dalam merancang kebijakan kebudayaan yang lebih inklusif, terutama yang berkaitan dengan penggunaan simbol-simbol resmi daerah. Ketika simbol seperti bahasa dalam hymne atau lambang daerah hanya mencerminkan satu kelompok etnis, maka kelompok-kelompok lain berisiko merasa tidak terwakili dalam komunitas yang seharusnya menjadi rumah bersama. Pemahaman tentang bagaimana masyarakat Simeulue memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh dapat menjadi bahan refleksi untuk membangun ke-Aceh-an yang benar-benar merangkul seluruh keragaman yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Rain Nauli, Fentisari Desti Sucipto, dan Rino Yuda dari Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, diterbitkan dalam Jurnal Desain Komunikasi Visual ISBI Aceh pada tahun 2024 dengan judul "Perancangan Maskot Sebagai Identitas Pariwisata Simeulue."¹⁵ Menggunakan metode *Design Thinking*, penelitian ini membangun identitas visual Kabupaten Simeulue melalui perancangan maskot pariwisata berbasis kearifan lokal, dengan hasil bahwa identitas suatu daerah dapat dikonstruksi melalui simbol visual yang berakar pada kekayaan alam dan tradisi setempat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek kajian, yakni Simeulue sebagai entitas kultural yang memiliki kekhasan tersendiri dan layak dikaji secara serius. Perbedaannya, Rain Nauli dkk. mendekati identitas dari sudut desain visual untuk kepentingan pariwisata, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana identitas Simeulue dimaknai, dirasakan, dan dinegosiasikan oleh masyarakatnya yang bermukim di Banda Aceh. Penelitian Rain Nauli dkk. membuktikan bahwa identitas Simeulue memiliki kekayaan kultural yang sah untuk dikaji, namun tidak menjangkau dimensi yang lebih dalam bagaimana masyarakat Simeulue itu sendiri menempatkan identitas mereka dalam konteks ke-Aceh-an yang lebih luas.

¹⁵ Rain Nauli, Fentisari Desti Sucipto, dan Rino Yuda, "Perancangan Maskot Sebagai Identitas Pariwisata Simeulue," *Jurnal Desain Komunikasi Visual ISBI Aceh*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2024), hlm. 49–53.

Penelitian kedua ditulis oleh Ovi Amalia Sari, Tabah Maryanah, dan Robi Cahyadi Kurniawan dari Universitas Lampung, dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul "Pertentangan Etnis Minoritas Terhadap Agenda Politik Identitas Elite Pemerintah Aceh."¹⁶ Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji respons kelompok etnis minoritas di Aceh terhadap pengesahan Qanun tentang bendera dan lambang daerah, dan menemukan bahwa kelompok-kelompok tersebut menolak simbol-simbol itu karena merasa tidak terwakili dalam narasi resmi yang dibangun elite politik. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada persoalan inti yang sama ketidaksetaraan representasi kelompok etnis minoritas dalam konstruksi identitas Aceh pascakonflik. Perbedaannya, Ovi Amalia Sari dkk. melihat fenomena ini dari sisi respons politik yang tampak di permukaan, sedangkan penelitian ini turun lebih dalam untuk menelusuri bagaimana satu kelompok etnis yang spesifik, yakni masyarakat Simeulue, memaknai dan menghidupi posisi tersebut dalam keseharian mereka di Banda Aceh. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan representasi etnis minoritas dalam identitas Aceh adalah persoalan yang nyata, namun belum menjangkau lapisan pengalaman yang paling personal bagaimana seseorang merasakan posisi itu dalam percakapan sehari-hari, dalam pilihan bahasa, dalam cara memaknai simbol daerah yang tidak tumbuh dari pengalaman komunitasnya sendiri.

Penelitian ketiga ditulis oleh Thung Ju Lan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, diterbitkan dalam *Jurnal Masyarakat dan*

¹⁶ Ovi Amalia Sari, Tabah Maryanah, dan Robi Cahyadi Kurniawan, "Pertentangan Etnis Minoritas Terhadap Agenda Politik Identitas Elite Pemerintah Aceh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Desember 2022.

Budaya dengan judul "Redefinisi Etnisitas dalam Konteks Kebudayaan Nasional."¹⁷ Penelitian ini berargumen bahwa etnisitas dalam Indonesia kontemporer bukan lagi sekadar penanda batas kelompok yang statis, melainkan dimensi kultural yang terus dimobilisasi dalam konteks politik identitas yang berubah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada cara memandang identitas etnis sebagai sesuatu yang dinamis dan terbentuk dalam relasi sosial, bukan sesuatu yang sudah tetap sejak lahir. Perbedaannya terletak pada skala kajian Thung Ju Lan bersifat makro dan nasional, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisisnya pada satu konteks yang sangat spesifik dan mendalam. Temuan Thung Ju Lan memberi landasan konseptual penting bagi penelitian ini bahwa etnisitas dalam Indonesia memang perlu didefinisikan namun redefinisi itu perlu diuji pada level yang lebih konkret bagaimana ia dialami oleh satu kelompok etnis tertentu dalam kehidupan nyata mereka.

Penelitian keempat ditulis oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan Miladiyatu Tsania Zulfa dari Universitas Gadjah Mada, diterbitkan dalam *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* pada tahun 2023 dengan judul "Smong: Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Warisan Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Simeulue."¹⁸ Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis tradisi smong sebagai sistem pengetahuan lokal yang telah terbukti menyelamatkan nyawa dan diwariskan secara turun-temurun. Persamaannya dengan penelitian ini terletak

¹⁷ Thung Ju Lan, "Redefinisi Etnisitas dalam Konteks Kebudayaan Nasional," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 8, No. 1 (2005), hlm. 123–140.

¹⁸ Ambar Teguh Sulistiyani dan Miladiyatu Tsania Zulfa, "Smong: Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Warisan Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, Vol. 4, No. 2 (September 2023).

pada perhatiannya terhadap kekayaan kultural Simeulue sebagai sesuatu yang hidup dan bermakna di dalam komunitas. Perbedaannya, Ambar Teguh Sulistiyani dkk. melihat identitas kultural Simeulue dalam konteks asalnya di kepulauan dan dalam fungsinya sebagai mitigasi bencana, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana identitas kultural yang sama itu dipertahankan dan dinegosiasikan ketika masyarakatnya hidup di Banda Aceh, jauh dari konteks asalnya. Penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat Simeulue memiliki sistem nilai yang mandiri temuan yang memperkuat premis penelitian ini bahwa masyarakat Simeulue di Banda Aceh membawa identitas kultural yang khas yang tidak serta-merta larut dalam narasi ke-Aceh-an yang dominan.

Penelitian kelima ditulis oleh Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho dari Universitas Gadjah Mada, diterbitkan dalam *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies* pada tahun 2013 dengan judul "'Islam' in the Global Village: Post-Tsunami Dialog and Negotiation of Aceh Identity."¹⁹ Penelitian ini mengkaji negosiasi identitas Aceh pasca tsunami 2004 dalam benturan antara identitas lokal dan konstruksi global, dan menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena dialog yang terbuka dan inklusif. Persamaannya dengan penelitian ini sangat dekat: keduanya memandang identitas Aceh sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan terus diperdebatkan. Perbedaannya, Ibnu Mujib dkk. memfokuskan analisis pada benturan antara Islam lokal dan pengaruh global dalam konteks pasca-bencana alam, sedangkan penelitian ini menelusuri negosiasi identitas yang terjadi

¹⁹ Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho, "'Islam' in the Global Village: Post-Tsunami Dialog and Negotiation of Aceh Identity," *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies (BJRS)*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2013), hlm. 4.

di dalam Aceh sendiri antara narasi ke-Aceh-an yang dominan dan pengalaman kelompok etnis kepulauan yang tidak sepenuhnya terwakili dalam narasi tersebut. Penelitian Ibnu Mujib dkk. membuka jalan penting dengan menunjukkan bahwa identitas Aceh adalah arena negosiasi yang terus bergerak, namun belum menyentuh dimensi internal Aceh yang menyangkut keberagaman etnis di dalamnya.

Penelitian keenam adalah disertasi yang ditulis oleh Ibnu Mujib di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014, berjudul "Konstruksi Identitas Keacehan Pasca Konflik dan Tsunami: Relasi Masyarakat, Negara, dan Pasar dalam Kebangkitan Lokal di Banda Aceh."²⁰ Disertasi ini menemukan bahwa konstruksi identitas ke-Aceh-an lebih banyak dikendalikan oleh aktor-aktor eksternal negara, pasar, dan kekuatan global bukan oleh dinamika dari dalam masyarakat sendiri, dan berlokasi di Banda Aceh sebagai pusat kajiannya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi kajian yang sama dan fokus pada proses konstruksi identitas ke-Aceh-an pascakonflik. Perbedaannya terletak pada posisi subjek yang dipilih Ibnu Mujib berdiri di sisi aktor-aktor yang memproduksi narasi identitas, sementara penelitian ini berdiri di posisi yang berlawanan di sisi kelompok yang menerima, merasakan, dan menegosiasikan narasi yang diproduksi oleh aktor-aktor tersebut. Disertasi Ibnu Mujib membuktikan bahwa konstruksi identitas Aceh adalah proses yang dikontestasikan oleh berbagai kekuatan, namun belum menelusuri bagaimana

²⁰ Ibnu Mujib, *Konstruksi Identitas Keacehan Pasca Konflik dan Tsunami: Relasi Masyarakat, Negara, dan Pasar dalam Kebangkitan Lokal di Banda Aceh*, Disertasi S3 Agama dan Lintas Budaya (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

kelompok etnis yang berada di tepian narasi tersebut, seperti masyarakat Simeulue, merespons dan memaknai posisi mereka dari dalam.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Idola Perdini Putri, Elisha Nasruddin, dan Juliana Abdul Wahab, diterbitkan dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* pada tahun 2018 dengan judul "Imagined Communities and the Construction of National Identity."²¹ Penelitian ini menguraikan cara kerja teori komunitas terbayangkan Anderson dalam proses konstruksi identitas nasional, dengan menekankan peran media massa sebagai instrumen utama yang memungkinkan anggota komunitas membayangkan kebersamaan mereka. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka Anderson sebagai basis analitis dan pada cara memandang identitas sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial melalui medium tertentu. Perbedaannya, Idola Perdini Putri dkk. menerapkan teori Anderson pada skala nasional dengan penekanan pada peran media cetak dan digital, sedangkan penelitian ini menerapkannya pada skala sub nasional komunitas regional Aceh dan lebih menitikberatkan pada pengalaman subjektif kelompok yang tidak sepenuhnya terwakili dalam produksi imajinasi kolektif tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa teori Anderson memiliki daya jangkauan yang luas, namun penerapannya selama ini masih terpusat pada skala nasional dan belum banyak diuji

²¹ Idola Perdini Putri, Elisha Nasruddin, dan Juliana Abdul Wahab, "Imagined Communities and the Construction of National Identity," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 7 (Juli 2018), hlm. 565–572.

pada dinamika identitas regional yang melibatkan kelompok-kelompok etnis minoritas di dalamnya.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Pratiwi Cristin Harnita, Putri Hergianasari, Jamilah Ahmad, dan Dewi Kartika Sari, diterbitkan dalam *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications* pada tahun 2019 dengan judul "A Critical Narrative of the Anderson Theory of Imagined Community: An Indonesian Perspective."²² Penelitian ini mendiskusikan teori Anderson secara kritis dari perspektif Indonesia, mencakup empat karakteristik utama *nation building*, *imagined*, *limited*, dan *sovereign* dan menyimpulkan bahwa teori Anderson memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bangsa dalam konteks Indonesia yang multietnis. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa teori Anderson perlu diuji dan dikritisi dalam konteks Indonesia yang tidak tunggal secara etnis. Perbedaannya, Pratiwi Cristin Harnita dkk. bekerja pada level kajian teoritis-kritis tanpa menguji argumen tersebut secara empiris, sedangkan penelitian ini bergerak satu langkah lebih jauh mengambil satu kasus empiris yang konkret untuk menguji sejauh mana dan dalam cara apa teori Anderson dapat menjelaskan pengalaman kelompok etnis minoritas dalam komunitas regional. Ini adalah justifikasi akademis paling langsung bagi penelitian ini keterbatasan yang diidentifikasi Pratiwi Cristin Harnita dkk. secara teoritis, penelitian ini berupaya menjawabnya secara empiris.

²² Pratiwi Cristin Harnita, Putri Hergianasari, Jamilah Ahmad, dan Dewi Kartika Sari, "A Critical Narrative of the Anderson Theory of Imagined Community: An Indonesian Perspective," *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications (IJMJMC)*, Vol. 5, Issue 3 (2019), hlm. 45–51.

Sintesis dan Gap Penelitian

Dari kedelapan penelitian di atas, tiga klaster tematik dapat diidentifikasi. Pertama, kajian tentang kekayaan kultural Simeulue sebagai entitas tersendiri, yang diwakili oleh Rain Nauli dkk. dan Ambar Teguh Sulistiyani dkk. Kedua, kajian tentang konstruksi dan negosiasi identitas Aceh pascakonflik, yang diwakili oleh Ovi Amalia Sari dkk., Ibnu Mujib dkk., dan Thung Ju Lan. Ketiga, kajian teoritis tentang komunitas terbayangkan Anderson dalam konteks Indonesia, yang diwakili oleh Idola Perdini Putri dkk. dan Pratiwi Cristin Harnita dkk. Ketiga klaster ini belum pernah dipertemukan dalam satu penelitian yang utuh dan pertemuan itulah yang menjadi titik kontribusi penelitian ini.

Celah pertama bersifat teoretis. Teori komunitas terbayangkan Anderson selama ini lebih banyak diterapkan pada skala nasional atau pada kajian tentang kelompok etnis yang dominan dalam produksi narasi identitas. Pratiwi Cristin Harnita dkk. sendiri mencatat bahwa teori ini memiliki keterbatasan dalam konteks Indonesia yang multietnis, namun argumentasi tersebut berhenti pada tataran kritik tanpa diuji secara empiris. Belum ada penelitian yang secara sistematis menggunakan kerangka Anderson untuk membaca pengalaman kelompok etnis minoritas dalam komunitas regional khususnya bagaimana mereka membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas yang tidak sepenuhnya memproduksi imajinasi kolektif dari pengalaman mereka. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan teori Anderson pada skala sub-nasional dan dari sudut pandang kelompok yang berada di tepian imajinasi kolektif tersebut.

Celah kedua bersifat empiris. Penelitian tentang konstruksi identitas Aceh pascakonflik yang ada hampir semuanya melihat identitas dari sisi aktor dominan negara, elite politik, atau kelompok etnis Aceh sebagai kelompok mayoritas. Suara kelompok etnis kepulauan seperti Simeulue yang secara administratif adalah bagian dari Aceh tetapi memiliki bahasa, adat, dan sejarah yang berbeda belum pernah menjadi subjek utama dalam kajian identitas ke-Aceh-an. Secara lebih spesifik, belum ada penelitian yang menelusuri pengalaman masyarakat Simeulue yang bermukim di Banda Aceh sebagai titik observasi dari dinamika tersebut.

Celah ketiga bersifat metodologis. Penelitian yang paling dekat dengan topik ini, yakni Ovi Amalia Sari dkk, menggunakan pendekatan yang berfokus pada respons politik dan kebijakan. Pendekatan semacam itu mampu menangkap yang tampak di permukaan, tetapi tidak menjangkau lapisan yang lebih dalam bagaimana seseorang dalam keseharian hidupnya memaknai posisi identitasnya dalam percakapan biasa, dalam pilihan bahasa, dalam cara merayakan tradisi jauh dari kampung halaman, dalam perasaan ketika mendengar hymne yang liriknya tidak tumbuh dari pengalaman komunitasnya sendiri. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan wawancara mendalam dan analisis tematik yang memungkinkan penggalian pengalaman identitas pada level yang paling personal dan sehari-hari.

2.2 Kerangka Konseptual

Sub-bab ini bukan landasan teori tambahan di luar teori Anderson yang digunakan dalam penelitian ini. Fungsinya adalah mendefinisikan secara operasional konsep-konsep kunci yang menjadi variabel penelitian, sehingga setiap istilah yang digunakan dalam analisis dipahami secara konsisten. Penelitian ini

memiliki satu variabel utama: pemaknaan identitas Aceh oleh masyarakat Simeulue yang bermukim di Banda Aceh. Variabel ini mengandung tiga konsep kunci. Pertama, identitas, yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pemaknaan diri" dalam penelitian ini. Kedua, identitas etnis, yang menjelaskan dalam pengertian apa ke-Simeulue-an dan ke-Aceh-an dipahami sebagai identitas yang berbeda namun dapat tumpang-tindih. Ketiga, negosiasi identitas, yang menjelaskan proses yang terjadi ketika kedua identitas tersebut berhadapan dalam kehidupan sehari-hari di Banda Aceh.

2.2.1 Identitas

Dalam ilmu sosial, perdebatan tentang identitas bergerak antara dua kutub yang saling bertegangan. Di satu sisi, esensialisme memandang identitas sebagai sesuatu yang melekat secara alami pada individu atau kelompok sejak lahir. Di sisi lain, konstruktivisme memahami identitas sebagai hasil dari proses sosial dan historis yang terus bergerak. Penelitian ini berdiri pada posisi kedua. Stuart Hall menegaskan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tinggal ditemukan, melainkan sesuatu yang terus diproduksi melalui representasi dan wacana ia selalu dalam proses menjadi, tidak pernah selesai terbentuk.²³

Pandangan ini penting untuk memahami bagaimana identitas ke-Aceh-an dikonstruksi melalui narasi-narasi tertentu pasca MoU Helsinki, dan bagaimana masyarakat Simeulue menempatkan diri dalam atau di luar narasi tersebut. Jika identitas dipahami sebagai sesuatu yang tetap, maka pertanyaan yang muncul hanya

²³ Stuart Hall, "Cultural Identity," dalam Jonathan Rutherford (ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart, 1990), hlm. 222

soal klasifikasi apakah mereka orang Aceh atau bukan. Tetapi jika identitas dipahami sebagai sesuatu yang terus dibentuk melalui pengalaman dan relasi sosial, pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana mereka memaknai posisi mereka dalam komunitas yang tidak sepenuhnya tumbuh dari pengalaman mereka sendiri

Identitas juga bersifat relasional ia tidak terbentuk dalam kevakuman sosial, melainkan selalu dalam hubungannya dengan yang lain. Kesadaran masyarakat Simeulue sebagai "orang Simeulue" sekaligus sebagai bagian dari "orang Aceh" tidak hadir begitu saja; ia tumbuh dan dipertajam justru melalui perjumpaan dengan perbedaan-perbedaan bahasa, simbol, dan cara mengekspresikan identitas yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari di Banda Aceh.

2.2.2 Identitas Etnis

Identitas etnis merujuk pada rasa keterikatan seseorang terhadap kelompok etnis tertentu, yang dibangun di atas kesadaran bersama akan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan pengalaman sejarah yang dimiliki secara kolektif. Dalam kajian sosiologi dan antropologi, identitas etnis tidak dipandang sebagai fakta kultural yang objektif dan bisa diukur dari luar, melainkan sebagai sesuatu yang dikonstruksi dan dipertahankan oleh anggota kelompok itu sendiri dalam interaksi sosial mereka sehari-hari.²⁴ Fredrik Barth menegaskan bahwa identitas etnis terbentuk bukan semata-mata oleh kesamaan isi kebudayaan, melainkan oleh batas-batas kelompok yang secara aktif ditarik dan dijaga dalam interaksi antarkelompok.²⁵ Batas itu tidak terletak pada daftar ciri budaya yang bisa dicatat,

²⁴ Zulkifli Lubis, "Identitas Etnis," hlm. 3

²⁵ Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries*, hlm. 15

tetapi pada cara masyarakatnya mendefinisikan "kami" dan "mereka" dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya.

Dalam konteks Aceh yang majemuk secara etnis, identitas etnis beroperasi dalam dua lapis. Ke dalam, ia menjadi sumber solidaritas dan perekat komunitas, terutama ketika kelompok tersebut berada dalam posisi minoritas di lingkungan yang berbeda. Ke luar, ia berhadapan dengan narasi identitas yang lebih besar yang tidak selalu memberikan ruang representasi yang setara. Thung Ju Lan mencatat bahwa redefinisi etnisitas di Indonesia seringkali berlangsung dalam ketegangan antara pengakuan formal atas keberagaman dan dominasi praktis satu kelompok etnis dalam membangun narasi bersama.²⁶ Ketegangan inilah yang menjadi latar sosial dari pengalaman masyarakat Simeulue di Banda Aceh: diakui sebagai bagian dari Aceh secara administratif, tetapi tidak sepenuhnya terwakili dalam simbol dan narasi yang mendefinisikan ke-Aceh-an itu sendiri.

2.2.3 Negosiasi Identitas

Negosiasi identitas adalah proses di mana individu atau kelompok secara aktif mengelola ketegangan antara identitas yang mereka miliki dengan tuntutan atau ekspektasi lingkungan sosial yang melingkupinya. Proses ini bukan penyesuaian pasif bukan sekadar ikut arus melainkan strategi yang terus berjalan, di mana seseorang memutuskan kapan, di mana, dan dalam cara seperti apa identitasnya ditampilkan, dipertahankan, atau untuk sementara waktu disimpan. Dalam studi tentang kelompok etnis yang hidup di lingkungan yang bukan asalnya,

²⁶ Thung Ju Lan, hlm. 125

negosiasi identitas adalah fenomena yang hampir tidak bisa dihindari.²⁷ Ia terjadi dalam percakapan sehari-hari, dalam pilihan bahasa yang digunakan, dalam keputusan untuk menjalankan atau tidak menjalankan tradisi di lingkungan yang berbeda.

Penelitian Ningsih tentang negosiasi identitas etnis Minang di Banda Aceh menemukan bahwa proses ini berlangsung melalui pemilahan ruang, ruang publik menjadi arena adaptasi, sementara ruang komunal menjadi tempat identitas asal dirawat dan dihidupkan kembali.²⁸ Pola ini relevan sebagai kerangka pembanding untuk melihat pengalaman masyarakat Simeulue. Yang membedakan, masyarakat Simeulue tidak hanya berhadapan dengan perbedaan antara etnis asal dan lingkungan baru, tetapi juga dengan narasi identitas daerah ke-Aceh-an yang secara formal menyertakan mereka tetapi secara simbolik belum sepenuhnya merepresentasikan mereka. Konsep negosiasi identitas dengan demikian menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa masyarakat Simeulue tidak memilih antara menjadi "orang Simeulue" atau "bagian dari Aceh," melainkan menghidupi keduanya secara bersamaan dalam cara yang bergantung pada konteks.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Komunitas Terbayangkan (Imagined Communities) Benedict Anderson

Benedict Anderson memperkenalkan konsep komunitas terbayangkan dalam karyanya *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of*

²⁷ Ovi Amalia Sari dkk., hlm. 4

²⁸ Ningsih, *Negosiasi Identitas*, hlm. 45

Nationalism yang terbit pertama kali pada tahun 1983 dan direvisi pada tahun 1991. Anderson berangkat dari pertanyaan yang tampak sederhana tetapi menyimpan kedalaman filosofis: apa sesungguhnya yang disebut bangsa, dan mengapa seseorang rela mengorbankan nyawa demi sesuatu yang tidak pernah ia lihat dan sentuh secara langsung? Dari pertanyaan itu ia sampai pada kesimpulan bahwa bangsa pada dasarnya bukanlah sesuatu yang nyata dalam pengertian fisik, melainkan sebuah komunitas yang dibayangkan.²⁹

Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan, bersifat terbatas, dan berdaulat. Ia disebut terbayangkan karena anggota-anggotanya tidak akan pernah saling mengenal secara langsung, namun di benak setiap orang hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.³⁰ Yang menyatukan mereka bukan pertemuan fisik, melainkan keyakinan bersama bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas yang sama sebuah keyakinan yang dibangun dan dipelihara melalui berbagai medium sosial dan kultural.

Komunitas terbayangkan bersifat terbatas, artinya ia selalu memiliki batas yang meskipun lentur, tidak pernah tak terhingga. Tidak ada komunitas yang membayangkan dirinya sama dengan seluruh umat manusia.³¹ Batas ini tidak selalu bersifat geografis; dalam banyak kasus, batas yang paling nyata justru bersifat kultural dan simbolik ditentukan oleh bahasa, narasi sejarah bersama, dan simbol-simbol kolektif yang digunakan untuk memproduksi imajinasi kebersamaan. Siapa

²⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2006), hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6–7.

³¹ *Ibid.*, hlm. 7.

yang menguasai produksi simbol-simbol itu, pada dasarnya ikut menentukan siapa yang berada di dalam dan siapa yang berada di luar batas komunitas tersebut.

Anderson secara khusus menekankan peran *print capitalism* kapitalisme cetak sebagai kekuatan utama yang melahirkan kesadaran komunitas dalam skala besar.³² Melalui surat kabar dan novel yang dicetak dalam bahasa yang sama dan dibaca oleh banyak orang secara bersamaan, terbentuk ruang bersama yang memungkinkan pembacanya membayangkan bahwa ada ribuan orang lain yang sedang melakukan hal yang sama pada waktu yang sama. Dari sinilah benih komunitas terbayangkan tumbuh.

Selain media cetak, Anderson juga menekankan pentingnya narasi sejarah, simbol-simbol bersama, dan upacara kolektif.³³ Bendera, lagu resmi, monumen, dan peringatan hari bersejarah bukan sekadar atribut formal, melainkan instrumen yang secara aktif membentuk rasa keterikatan kolektif. Simbol-simbol ini bekerja justru karena tidak memerlukan penjelasan ia cukup dirasakan oleh mereka yang tumbuh bersamanya. Penting untuk dicatat bahwa Anderson tidak menggunakan kata "terbayangkan" dalam pengertian palsu atau tidak nyata. Baginya, semua komunitas yang lebih besar dari perkampungan tatap muka pada dasarnya adalah terbayangkan.³⁴ Yang membedakan satu komunitas dari yang lain bukan soal asli atau palsu, melainkan cara komunitas itu dibayangkan inklusif atau eksklusif, terbuka atau tertutup, menyertakan banyak suara atau hanya suara yang dominan.

³² *Ibid.*, hlm. 44–45

³³ *Ibid.*, hlm. 36

³⁴ *Ibid.*, hlm. 7

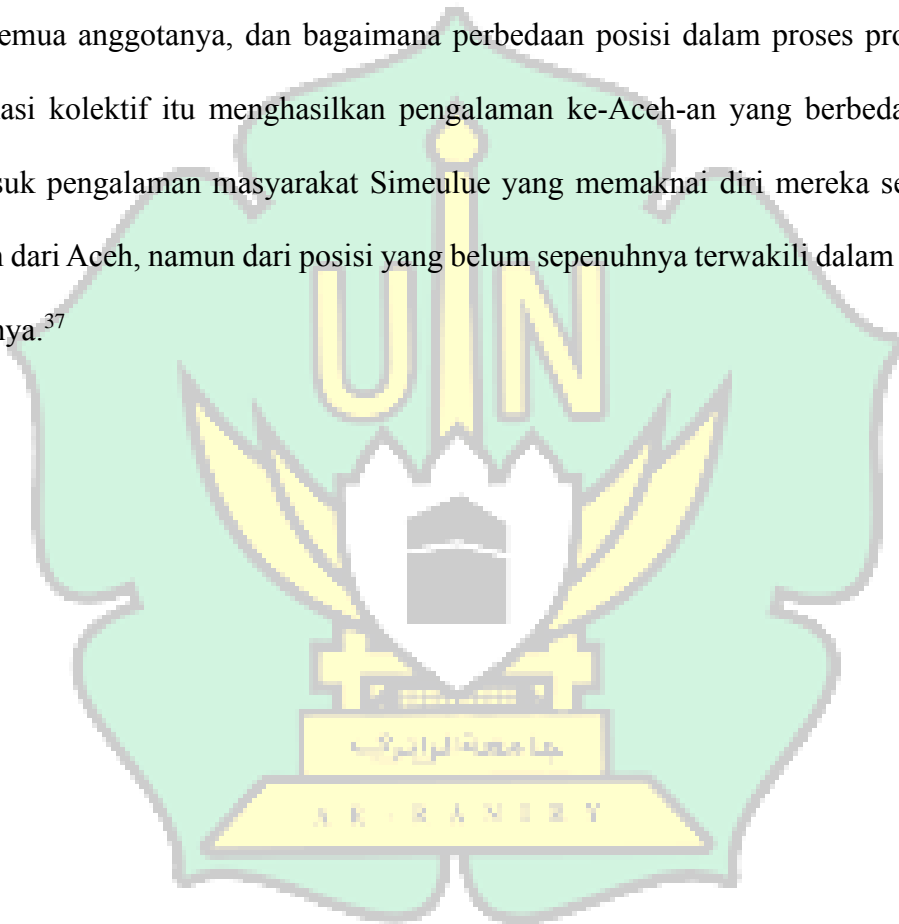
Penerapan teori Anderson dalam penelitian ini bekerja pada dua level sekaligus. Level pertama adalah memahami bagaimana identitas Aceh sebagai komunitas regional sedang dikonstruksi ulang pasca MoU Helsinki. Narasi perdamaian, simbol-simbol resmi seperti bendera bulan bintang dan hymne Aceh yang berbahasa Aceh, serta penerapan syariat Islam secara formal adalah instrumen-instrumen pembentuk imajinasi kolektif dalam pengertian Anderson medium yang digunakan untuk membangun bayangan bersama tentang siapa "orang Aceh" dan apa yang menyatukan mereka.³⁵ Level kedua adalah mempertanyakan apakah proses pembentukan imajinasi kolektif tersebut bersifat simetris apakah semua kelompok etnis yang secara administratif adalah bagian dari Aceh ikut serta secara setara dalam proses pembayangan itu, atau ada yang berada di tepiannya. Anderson sendiri mengingatkan bahwa batas komunitas terbayangkan tidak selalu bersifat geografis, tetapi juga kultural dan simbolik.³⁶

Di sinilah ketiga konsep dalam kerangka konseptual bertemu dengan teori Anderson dan membentuk satu kerangka analisis yang utuh. Konsep identitas menjelaskan mengapa ke-Aceh-an tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan selesai ia terus diproduksi melalui representasi dan wacana. Konsep identitas etnis menjelaskan mengapa batas antara ke-Simeulue-an dan ke-Aceh-an bukan batas yang kasar dan disadari semua orang, melainkan batas yang ditarik dalam interaksi sosial sehari-hari melalui bahasa, simbol, dan pengalaman yang berbeda.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 163

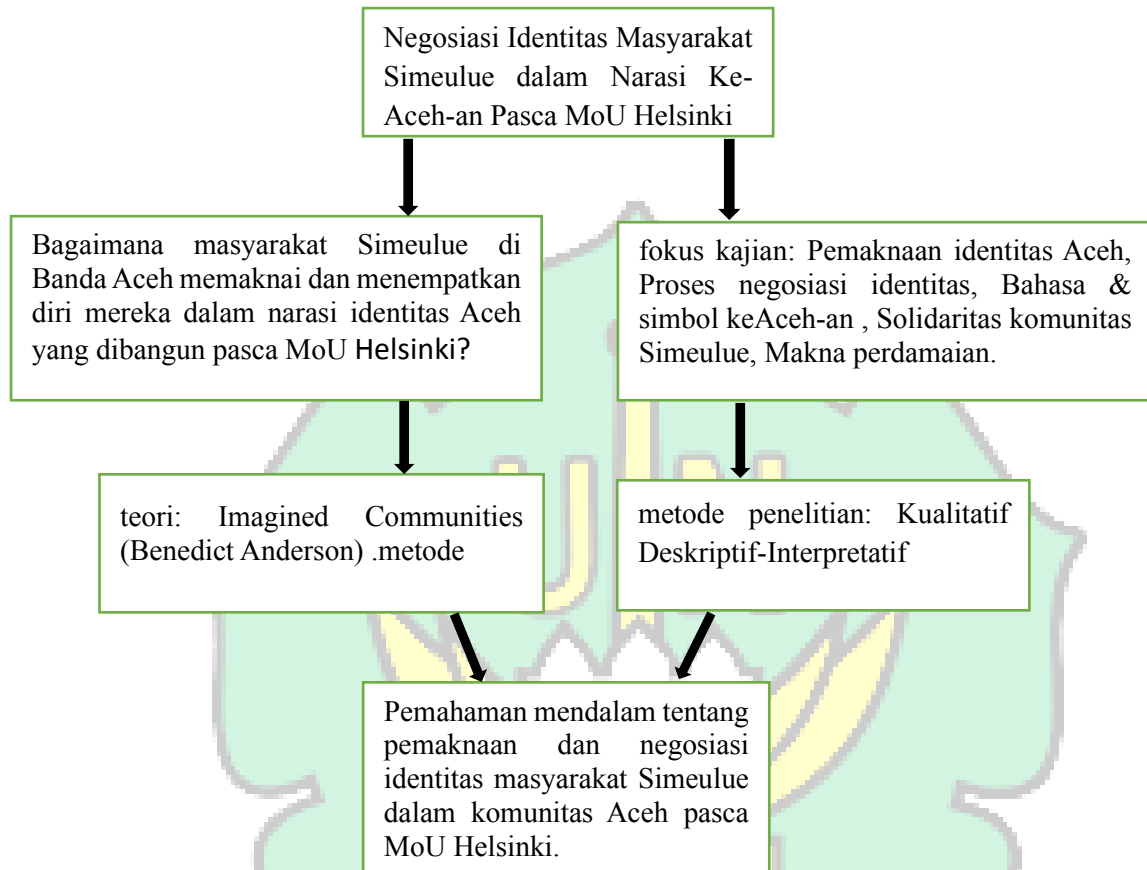
³⁶ Ibnu Mujib dkk. 2013, hlm. 4

Konsep negosiasi identitas menjelaskan bagaimana masyarakat Simeulue secara aktif mengelola posisi mereka di dalam komunitas terbayangkan yang tidak sepenuhnya memproduksi imajinasi kolektif dari pengalaman mereka. Teori Anderson menjadi kerangka yang mengikat ketiganya ia menjelaskan mengapa komunitas yang terbayangkan tidak selalu terbayangkan dengan cara yang sama oleh semua anggotanya, dan bagaimana perbedaan posisi dalam proses produksi imajinasi kolektif itu menghasilkan pengalaman ke-Aceh-an yang berbeda-beda termasuk pengalaman masyarakat Simeulue yang memaknai diri mereka sebagai bagian dari Aceh, namun dari posisi yang belum sepenuhnya terwakili dalam narasi resminya.³⁷



³⁷ Anderson, *Imagined Communities*, hlm. 6

2.4 Kerangka Berpikir



Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari kondisi yang terbentuk pasca penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Perjanjian damai tersebut tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga membuka ruang bagi rekonstruksi identitas Aceh secara formal melalui berbagai kebijakan dan simbol resmi daerah.³⁸ Namun dalam prosesnya, narasi ke-Aceh-an yang terbentuk lebih banyak mencerminkan simbol

³⁸ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (California: Stanford University Press, 2009), hlm. 2-3.

dan bahasa kelompok etnis tertentu, terutama melalui penggunaan bahasa Aceh dalam hymne daerah dan berbagai ekspresi budaya yang dominan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Simeulue yang secara administratif adalah bagian dari Aceh tetapi memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda dalam posisi yang tidak sepenuhnya terwakili dalam narasi identitas tersebut.

Kondisi inilah yang melahirkan permasalahan penelitian ini. Ketika masyarakat Simeulue bermukim di Banda Aceh pusat tempat narasi ke-Aceh-an diproduksi dan dikumandangkan mereka dihadapkan pada proses pemaknaan identitas yang kompleks menjadi bagian dari Aceh secara administratif, namun tidak selalu merasa terwakili secara simbolik dan kultural. Persoalan inilah yang menjadi rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki.

Untuk membedah persoalan ini secara ilmiah, penelitian menggunakan kerangka teori komunitas terbayangkan yang dikembangkan oleh Benedict Anderson. Anderson menjelaskan bahwa komunitas termasuk komunitas regional seperti Aceh terbentuk bukan karena kesamaan fisik atau pertemuan langsung, melainkan melalui imajinasi kolektif yang dibangun bersama melalui narasi, simbol, dan pengalaman yang dibagi bersama.³⁹ Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat Simeulue membayangkan dan menempatkan diri dalam komunitas Aceh yang sedang dikonstruksi ulang, serta

³⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2006), hlm. 6.

apakah mereka merasa menjadi bagian penuh dari komunitas yang dibayangkan tersebut.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan wawancara mendalam terhadap 15 informan yang merupakan masyarakat Simeulue bermukim di Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan analisis tematik induktif Braun dan Clarke, sehingga tema-tema yang muncul benar-benar berakar pada pengalaman dan narasi informan sendiri, bukan pada asumsi peneliti.⁴⁰ Kajian difokuskan pada lima tema utama yang saling berkaitan: pemaknaan identitas Aceh, proses negosiasi identitas, bahasa dan simbol ke-Aceh-an, solidaritas komunitas Simeulue, serta makna perdamaian pasca MoU Helsinki.

Melalui kajian terhadap kelima tema tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah tentang bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menegosiasikan posisi mereka dalam komunitas Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Identitas regional di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika identitas kelompok etnis minoritas dalam konteks daerah pascakonflik.

⁴⁰ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 2 (2006), hlm. 79.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada masyarakat Simeulue yang bermukim di kota tersebut. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi Aceh, sekaligus menjadi kota tujuan utama bagi masyarakat dari berbagai kabupaten di Aceh, termasuk masyarakat Simeulue yang datang untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun mencari penghidupan yang lebih baik.

Relevansi akademis Banda Aceh sebagai lokasi penelitian terletak pada kenyataan bahwa di kota inilah proses konstruksi identitas ke Aceh-an berlangsung paling intensif pasca MoU Helsinki Kebijakan-kebijakan yang membentuk narasi identitas Aceh dirumuskan dan dijalankan di sini, simbol-simbol resmi daerah dikumandangkan, dan wacana tentang ke Aceh-an diproduksi secara aktif. Masyarakat Simeulue yang bermukim di Banda Aceh berada langsung di tengah proses tersebut. Mereka adalah bagian dari Aceh secara administratif, namun membawa serta identitas kultural dari Simeulue yang memiliki bahasa, adat, dan tradisi tersendiri. Kondisi inilah yang menjadikan mereka subjek yang tepat untuk mengkaji bagaimana seseorang memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas komunitas yang lebih besar.

Selain pertimbangan akademis, masyarakat Simeulue di Banda Aceh tersebar di beberapa wilayah seperti Lampineung, Darussalam, dan Lueng Bata dengan jaringan sosial yang cukup kuat. Keberadaan mereka dalam jumlah yang

cukup signifikan memudahkan peneliti dalam menjangkau informan yang beragam dari segi usia, latar belakang pekerjaan, dan lamanya bermukim di kota ini

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji menyangkut cara masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh sebuah persoalan yang sifatnya subjektif, kontekstual, dan hanya bisa dipahami secara mendalam melalui pengalaman dan perspektif para pelakunya sendiri.⁴¹

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengandalkan kepekaan interpretasi untuk memahami dunia sosial informan.⁴² Data digali melalui cerita, pengalaman hidup, dan praktik keseharian yang mencerminkan bagaimana identitas dibentuk dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka teori komunitas terbayangkan Benedict Anderson yang digunakan dalam penelitian ini, di mana identitas dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial melalui narasi, simbol, dan pengalaman kolektif bukan sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan dapat diukur secara tunggal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

⁴² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan informan, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang bersifat fleksibel.⁴³ Teknik ini dipilih karena persoalan yang diteliti menyangkut cara masyarakat Simeulue memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh sebuah persoalan yang sifatnya sangat personal dan kontekstual, sehingga hanya bisa digali melalui ruang percakapan yang terbuka dan mendalam.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan panduan pertanyaan sebagai kerangka dasar, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel dan mengikuti alur percakapan yang berkembang. Panduan wawancara disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian yang meliputi pengalaman dan alasan bermukim di Banda Aceh, cara informan memaknai identitas Simeulue dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka memandang simbol-simbol resmi ke Aceh-an seperti bahasa, bendera, dan hymne Aceh, serta bagaimana mereka menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas Aceh yang lebih besar.

Wawancara dilaksanakan di tempat yang dipilih oleh informan sendiri, seperti di rumah, tempat kerja, atau tempat umum yang nyaman, agar informan merasa tidak terbebani dan dapat berbicara secara lebih terbuka. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kenyamanan informan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Simeulue. Durasi setiap sesi wawancara berkisar antara 60-90 menit. Dengan seizin informan, setiap sesi wawancara direkam menggunakan alat perekam untuk kemudian ditranskrip secara verbatim sebagai bahan analisis. Peneliti juga membuat catatan singkat selama dan setelah wawancara untuk

⁴³Ibid., hlm. 186-187.

mendokumentasikan konteks percakapan dan hal-hal yang tidak terekam dalam audio namun relevan bagi pemahaman data.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Simeulue yang bermukim di Kota Banda Aceh Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁴ Kriteria yang ditetapkan adalah berasal dari Kabupaten Simeulue, telah bermukim di Banda Aceh minimal dua tahun, dan berusia minimal 20 tahun. Batasan minimal dua tahun ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rentang waktu tersebut seseorang sudah mengalami proses penyesuaian dengan lingkungan baru dan mulai membentuk pandangan yang lebih matang tentang posisi identitasnya.

Peneliti tidak membatasi informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau jenis pekerjaan. Hal ini dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keragaman perspektif yang lebih luas, sehingga temuan penelitian tidak hanya mencerminkan pandangan satu kelompok tertentu saja. Keragaman latar belakang informan justru diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat Simeulue dari berbagai kalangan memaknai identitas ke-Aceban dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Proses pemilihan informan dimulai dari informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan luas tentang komunitas Simeulue di Banda Aceh, seperti tokoh masyarakat atau pengurus organisasi kedaerahan Simeulue yang ada di kota

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 131

ini. Dari informan kunci tersebut, peneliti kemudian menggunakan teknik snowball sampling untuk menjangkau informan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.⁴⁵ Teknik ini dipilih karena komunitas Simeulue di Banda Aceh memiliki jaringan sosial yang cukup erat, sehingga pendekatan melalui rekomendasi orang yang sudah dikenal dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan informan dalam proses wawancara

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang. Penetapan jumlah ini mengacu pada prinsip kecukupan data dalam penelitian kualitatif, di mana data dianggap cukup apabila sudah mencapai titik kejenuhan, yaitu ketika informasi yang diberikan oleh informan baru sudah tidak lagi menambahkan hal yang berbeda secara signifikan dari informasi yang telah diperoleh sebelumnya.⁴⁶ Dengan 15 informan yang memiliki latar belakang beragam dari segi usia, pekerjaan, dan lamanya bermukim di Banda Aceh, peneliti menilai bahwa data yang terkumpul sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

⁴⁵ Ibid, hlm. 133.

⁴⁶ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 224.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Nama (Inisial) | Usia | Pekerjaan | Lama Bermukim di Banda Aceh | Alasan Bermukim |
|----|----------------|-------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Hafiz | 23 th | Mahasiswa | 3 tahun | Pendidikan |
| 2 | Fitriani | 24 th | Mahasiswi | 4 tahun | Pendidikan |
| 3 | Lara Sinta | 23th | Mahasiswi | 3 tahun | Pendidikan |
| 4 | Adifal Fauzan | 23th | Mahasiswa | 4 tahun | Pendidikan |
| 5 | Nabila Assahra | 21th | Mahasiswi | 2 tahun | Pendidikan |
| 6 | Efi | 40 | Warga Menetap | 13 tahun | Menetap (keluarga) |
| 7 | Ridwan | 41 th | Guru | 15 tahun | Pekerjaan |
| 8 | Hasan Basri | 39 th | ASN | 12 tahun | Pekerjaan |
| 9 | Siti Halimah | 45 th | Pedagang | 19 tahun | Menetap (keluarga) |
| 10 | Sarliatun | 23th | Mahasiswi | 3 tahun | Pendidikan |
| 11 | Asrida | 28 th | Pekerja | 6 tahun | Pekerjaan |
| 12 | Seri | 34 th | Warga menetap | 7 tahun | Menetap (keluarga) |
| 13 | Hanafi | 43 th | ASN | 2 tahun | Menetap (keluarga) |
| 14 | Uhti Rahmani | 24th | Mahasiswi | 4 tahun | Pendidikan |
| 15 | M. Afid | 26 th | Pekerja | 5 tahun | Pekerjaan |

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁷ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara mendalam dengan 15 informan. Data ini berupa narasi, cerita pengalaman, pandangan, dan refleksi informan tentang bagaimana mereka memaknai identitas ke-Aceh-an dan menempatkan diri dalam

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 137.

komunitas Aceh selama bermukim di Banda Aceh. Bentuk konkret dari data primer ini adalah rekaman wawancara yang telah ditranskrip secara verbatim, disertai catatan yang dibuat peneliti selama proses pengumpulan data berlangsung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari literatur ilmiah yang relevan, mencakup buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas konstruksi identitas Aceh, sejarah sosial dan budaya masyarakat Simeulue, serta kajian-kajian tentang teori komunitas terbayangkan Benedict Anderson. Data sekunder berfungsi untuk memberikan konteks teoritis dan historis yang memadai, memperkuat analisis terhadap data primer, serta membantu peneliti dalam memahami temuan lapangan dalam kerangka konseptual yang lebih luas.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik induktif yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola makna atau tema yang muncul dari data.⁴⁹ Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai identitas ke-Aceh-an melalui pengalaman dan narasi mereka sendiri. Berbeda dengan pendekatan deduktif yang berangkat dari teori untuk menguji data, analisis tematik induktif membiarkan tema tumbuh langsung dari data tanpa dipaksakan

⁴⁸ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 157.

⁴⁹ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, Vol 3, No. 2 (2006), hlm. 79.

oleh kerangka yang sudah ada sebelumnya. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap berikut.

Tahap pertama: Membaca dan Memahami Data. Proses analisis dimulai dengan membaca seluruh transkrip wawancara secara berulang dan menyeluruh. Pada tahap ini peneliti tidak langsung menarik kesimpulan, melainkan berupaya memahami isi, nuansa, dan konteks dari setiap percakapan. Pembacaan berulang ini penting untuk memastikan peneliti benar-benar menguasai keseluruhan data sebelum mulai menganalisisnya. Selama proses pembacaan, peneliti mencatat kesan awal dan bagian-bagian yang terasa penting atau berulang muncul dalam Jawaban informan yang berbeda.

Tahap kedua: Pemberian Kode. Setelah transkrip dikuasai secara menyeluruh, peneliti memberikan kode pada bagian-bagian teks yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Kode adalah label singkat yang diberikan pada setiap segmen data untuk menandai makna atau isi dari bagian tersebut.⁵⁰ Proses ini dilakukan pada seluruh transkrip secara menyeluruh sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, ketika seorang informan menyatakan bahwa dirinya merasa seperti "tamu lama" di Banda Aceh meskipun sudah tinggal hampir dua puluh tahun, kode yang diberikan adalah "pengakuan identitas yang bersyarat" karena pernyataan tersebut mencerminkan pengalaman diterima sebagai penduduk tetapi belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari identitas dominan.

Tahap ketiga: Pencarian dan Pembentukan Tema. Kode-kode yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna untuk

⁵⁰ Ibid., hlm. 88.

membentuk tema-tema yang lebih besar.⁵¹ Pada tahap ini peneliti melihat pola-pola yang muncul lintas informan dan mengelompokkan kode-kode yang saling berkaitan ke dalam satu tema yang mencerminkan makna bersama. Tema bukan sekadar topik yang sering disebutkan, tetapi pola makna yang lebih dalam yang mencerminkan pengalaman kolektif para informan. Setelah tema terbentuk, peneliti memeriksa kembali apakah setiap tema benar-benar didukung oleh data yang memadai dari berbagai informan, bukan hanya dari satu atau dua orang saja.

Tahap keempat: Penyajian dan Interpretasi Tema. Tahap terakhir adalah menyajikan setiap tema secara naratif dalam laporan penelitian, disertai kutipan langsung dari wawancara sebagai ilustrasi dan bukti. Setiap tema tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga diinterpretasi maknanya dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teori komunitas terbayangkan Anderson yang digunakan. Kutipan dipilih secara selektif untuk mewakili tema dengan cara yang paling jelas dan bermakna, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana kesimpulan penelitian benar-benar berakar pada pengalaman dan suara informan itu sendiri.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dinilai berdasarkan empat kriteria yang dirumuskan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.⁵² Dalam penelitian ini, upaya menjaga keabsahan

⁵¹ Ibid., hlm. 89-91.

⁵² Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 324.

data difokuskan pada aspek kredibilitas, yaitu sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan pengalaman informan yang sesungguhnya.

Untuk memenuhi standar kredibilitas tersebut, penelitian ini menggunakan teknik member checking. Member checking adalah proses pengecekan kembali data atau temuan sementara yang telah disusun peneliti kepada informan yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa apa yang dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh informan.⁵³ Proses ini dilakukan setelah transkrip wawancara dan analisis awal selesai. Peneliti menyampaikan kembali inti interpretasinya kepada informan dan meminta konfirmasi apakah pemahaman tersebut sudah tepat. Apabila informan merasa ada yang kurang tepat atau perlu ditambahkan, peneliti melakukan penyesuaian sebelum data tersebut digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Selain member checking, keabsahan data juga dijaga melalui keterlibatan yang mendalam selama proses pengumpulan data. Peneliti berupaya membangun kedekatan dengan informan sebelum wawancara dimulai agar informan merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka dan jujur. Dalam penelitian tentang identitas, kedekatan ini sangat penting karena pengalaman identitas adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak selalu mudah diungkapkan kepada orang yang belum dikenal dengan baik.

Kriteria kedua adalah keteralihan (transferability), yaitu sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Penelitian ini memenuhi kriteria keteralihan

⁵³ Ibid, hlm. 327.

dengan menyajikan deskripsi yang tebal (*thick description*) tentang latar sosial, karakteristik informan, dan konteks penelitian secara rinci. Dengan deskripsi yang memadai, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sendiri sejauh mana temuan penelitian ini relevan dengan konteks serupa, misalnya pengalaman kelompok etnis minoritas lain yang hidup di pusat pemerintahan daerah mereka masing-masing.

Kriteria ketiga adalah kebergantungan (*dependability*), yaitu konsistensi proses penelitian. Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti mendokumentasikan secara sistematis seluruh tahap penelitian, mulai dari proses pemilihan informan, pelaksanaan wawancara, transkripsi, pemberian kode, hingga pembentukan tema. Dokumentasi ini memungkinkan proses penelitian untuk diperiksa ulang dan diverifikasi oleh pihak lain jika diperlukan. Panduan wawancara yang digunakan juga bersifat konsisten meskipun pelaksanaannya fleksibel mengikuti alur percakapan.

Kriteria keempat adalah kepastian (*confirmability*), yaitu sejauh mana temuan penelitian mencerminkan data yang dikumpulkan dan bukan semata-mata persepsi atau asumsi peneliti. Kepastian dalam penelitian ini dijaga melalui dua cara. Pertama, setiap interpretasi yang diajukan selalu didasarkan pada kutipan langsung dari wawancara yang dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya. Kedua, analisis tematik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, artinya tema-tema yang muncul tumbuh dari data itu sendiri, bukan dari asumsi awal peneliti. Dengan demikian, temuan penelitian ini berakar kuat pada pengalaman dan suara informan yang sesungguhnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari data wawancara mendalam dengan 15 informan, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori komunitas terbayangkan Benedict Anderson.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pemaknaan Identitas Aceh oleh Masyarakat Simeulue

Salah satu temuan paling mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat Simeulue di Banda Aceh tidak memahami identitas Aceh sebagai sesuatu yang bersifat tunggal dan seragam. Bagi mereka, menjadi orang Aceh bukan soal menguasai bahasa tertentu atau lahir di wilayah tertentu, melainkan soal nilai-nilai keislaman, adat, dan rasa kebersamaan yang mereka yakini telah lama menyatukan berbagai kelompok etnis di Aceh dalam satu ikatan yang bermakna.

Sebagian besar informan menempatkan Islam sebagai fondasi utama ke-Aceh-an yang mereka rasakan. Dalam pandangan mereka, Islam adalah ruang yang merangkul semua orang Aceh tanpa memandang latar belakang etnis atau bahasa. Hafiz, seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang telah tinggal di Banda Aceh selama tiga tahun, mengungkapkan pandangannya dengan cara yang lugas:

"Kalau menurut saya, orang Aceh itu ya orang yang punya nilai-nilai Islam yang kuat, sopan, dan menjunjung adat. Tapi setelah

MoU Helsinki, identitas itu jadi lebih terbuka. Cuma kadang terasa kayak identitas Aceh itu hanya dilihat dari bahasa dan simbol-simbol tertentu. Padahal kita yang dari Simeulue juga bagian dari Aceh, walau budaya dan bahasa kita beda."

(Hafiz, 23 tahun, mahasiswa)

Pernyataan Hafiz memperlihatkan dua hal sekaligus: pengakuan yang tulus terhadap identitas ke-Aceh-an, dan kesadaran bahwa identitas tersebut dalam praktiknya sering diukur melalui penanda yang tidak dimiliki oleh kelompok Simeulue. Ia merasa menjadi bagian dari Aceh secara nilai, tetapi merasakan jarak ketika identitas Aceh dimaknai secara sempit melalui simbol budaya tertentu.

Perasaan serupa diungkapkan oleh Siti Halimah, seorang pedagang berusia 45 tahun yang telah bermukim di Banda Aceh hampir dua dekade. Pengalamannya yang panjang justru memperdalam kesadarannya tentang posisi identitas yang ia tempati:

"Bagi saya, orang Aceh itu orang yang beradat, bersyariat, tapi juga harus adil memandang keberagaman. Saya di sini merasa seperti tamu lama. Sudah 19 tahun di Banda Aceh, tapi tetap aja kalau nggak bisa bahasa Aceh, dianggap bukan orang Aceh asli."

(Siti Halimah, 45 tahun, pedagang)

Ungkapan "tamu lama" yang digunakan Siti Halimah adalah metafora yang kuat dan bermakna. Ia bukan tamu dalam arti tidak dikenal atau tidak diterima ia sudah dikenal, punya tetangga, punya pelanggan, punya relasi sosial yang stabil. Namun ia tetap berada di luar batas simbolik yang menentukan siapa yang benar-benar "orang Aceh" dalam pengertian yang dominan. Batas itu bukan batas yang kasar atau disadari oleh semua orang, tetapi ia terasa nyata dalam percakapan sehari-hari.

Ridwan, seorang guru berusia 41 tahun, menambahkan dimensi lain dalam pemaknaan ini. Baginya, persoalannya bukan pada penolakan, melainkan pada ketidaksetaraan representasi:

"Identitas Aceh itu hasil dari sejarah panjang. Tapi seharusnya setelah damai, semua etnis di Aceh dilihat sama. Realitanya belum begitu. Kami dari pulau kadang masih seperti penonton."

(Ridwan, 41 tahun, guru)

Kata "penonton" yang dipilih Ridwan mencerminkan posisi yang hadir tetapi tidak menentukan diakui keberadaannya, tetapi tidak memiliki suara dalam mendefinisikan narasi identitas kolektif. Dari keseluruhan narasi tersebut, terlihat bahwa masyarakat Simeulue memaknai identitas Aceh sebagai ruang yang inklusif secara nilai, namun mengalami keterbatasan representasi dalam ekspresi simboliknya. Mereka adalah bagian dari Aceh, tetapi bagian yang belum sepenuhnya dilihat.

4.1.2 Bahasa sebagai Ruang Adaptasi dan Negosiasi Identitas

Bahasa adalah ruang di mana identitas paling terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengalaman masyarakat Simeulue di Banda Aceh, bahasa Aceh berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai penanda siapa yang dianggap "orang dalam" dan siapa yang tidak. Ketidakmampuan menggunakan bahasa Aceh secara otomatis menempatkan seseorang pada posisi berbeda dalam lingkaran sosial, meskipun secara formal mereka adalah warga yang sama.

Hafiz menggambarkan pengalaman ini dengan cara yang sangat konkret. Bukan dalam situasi formal atau konfrontatif, melainkan dalam momen-momen sederhana yang justru paling terasa:

"Saya baik-baik saja dengan orang di kampus. Mereka ramah. Cuma kalau sudah ngobrol pakai bahasa Aceh, saya jadi cuma dengar. Rasanya kayak ada pintu yang saya belum bisa buka."

(Hafiz, 23 tahun, mahasiswa)

Metafora "pintu yang belum bisa dibuka" menggambarkan dengan tepat bagaimana bahasa bekerja sebagai mekanisme sosial: bukan mengusir, tetapi membatasi seberapa dalam seseorang bisa masuk ke dalam kedekatan yang sesungguhnya. Siti Halimah, yang sudah hampir dua puluh tahun di Banda Aceh, merasakannya dengan cara yang lebih mapan namun tak kalah tajam:

"Saya bisa bergaul dan ngobrol sama orang-orang di sini. Tapi kalau soal bahasa, tetap ada batas. Kita tetap kelihatan berbeda kalau tidak bisa bahasa Aceh."

(Siti Halimah, 45 tahun, pedagang)

Namun bahasa tidak hanya menjadi sumber jarak. Di sisi lain, bahasa Simeulue Devayan dan Sigulai justru menjadi ruang paling intim bagi mereka. Ketika berkumpul sesama orang Simeulue, bahasa daerah mereka sendiri menjadi rumah yang bisa dikunjungi kapan saja meski jauh dari kampung halaman. Fitriani, mahasiswi berusia 22 tahun, mengungkapkannya dengan sederhana:

"Kalau lagi kumpul sesama orang Simeulue, kami otomatis pakai bahasa kami sendiri. Rasanya lebih hangat. Kayak pulang walaupun masih di sini."

(Fitriani, 22 tahun, mahasiswi)

Ungkapan "kayak pulang" ini mengungkapkan bahwa bahasa bagi mereka bukan sekadar alat bicara, melainkan ruang emosional yang menyimpan memori, keakraban, dan rasa aman. Ridwan memperjelas posisi bahasa sebagai penanda sosial yang disadari bersama:

"Bahasa itu penanda kelompok. Walaupun kita saling bergaul, tetap ada perbedaan. Tapi kita saling ngerti batas itu."

(Ridwan, 41 tahun, guru)

Yang menarik dari pernyataan Ridwan adalah kata "saling ngerti". Batas itu bukan sesuatu yang ditolak atau diperdebatkan ia diterima sebagai bagian dari realitas sosial yang dijalani bersama. Dengan demikian, bahasa dalam pengalaman masyarakat Simeulue di Banda Aceh berfungsi ganda: sebagai ruang adaptasi yang menuntut usaha, sekaligus sebagai ruang perlindungan identitas yang paling setia.

4.1.3 Praktik Keagamaan dan Adat sebagai Jembatan Identitas

Jika bahasa menjadi ruang di mana batas identitas paling terasa, maka agama dan adat justru menjadi ruang di mana batas itu paling cair. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Simeulue di Banda Aceh, masjid, kenduri, dan kegiatan keagamaan menjadi ruang pertemuan yang melampaui perbedaan etnis dan bahasa. Di ruang-ruang itulah mereka merasa paling setara dengan masyarakat Aceh lainnya.

Hasan Basri, seorang ASN berusia 39 tahun, menggambarkan perbedaan suasana yang ia rasakan antara ruang keagamaan dan ruang sosial sehari-hari:

"Kalau di masjid atau acara kenduri, semua sama. Di situ batas identitas itu tipis sekali. Tapi begitu keluar dari ruang itu, bahasa kembali jadi batas."

(Hasan Basri, 39 tahun, ASN)

Pernyataan ini mengungkapkan sesuatu yang penting: identitas tidak bersifat tetap dalam semua situasi. Ia berubah-ubah tergantung pada ruang sosial yang ditempati. Dalam ruang keagamaan, nilai Islam yang dipegang bersama menjadi penyama yang kuat, melampaui perbedaan bahasa dan adat. Inilah yang dimaksud banyak informan ketika mereka menyebut Islam sebagai fondasi ke-Aceh-an yang inklusif.

Praktik adat Simeulue juga memiliki fungsi yang berbeda. Bagi masyarakat Simeulue di Banda Aceh, tradisi seperti nandong nyanyian tradisional Simeulue dan praktik memasak makanan khas kampung halaman bukan sekadar hiburan, melainkan cara aktif mempertahankan identitas di tengah lingkungan yang berbeda. Fitriani mengisahkan:

"Kalau lagi stres atau kangen rumah, kami nyanyi nandong, masak ikan asap. Rasanya kayak sedang di kampung."

(Fitriani, 22 tahun, mahasiswi)

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa identitas Simeulue tidak pasif menunggu untuk diakui, melainkan secara aktif dihidupkan ulang dalam konteks kehidupan urban. Adat dan tradisi berfungsi sebagai tali yang menghubungkan

mereka dengan kampung halaman, sekaligus sebagai cara mengatakan: kami ada, kami berbeda, dan perbedaan itu kami jaga dengan bangga.

4.1.4 Pandangan terhadap Simbol-Simbol Resmi Ke Aceh-an

Simbol-simbol resmi ke-Aceh-an seperti bendera dan hymne Aceh menjadi salah satu cermin yang paling jelas untuk melihat bagaimana masyarakat Simeulue menempatkan diri dalam narasi identitas Aceh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap simbol-simbol tersebut tidaklah sederhana: bukan penolakan, bukan pula penerimaan yang sepenuh hati. Yang ada adalah penghormatan yang berjarak sebuah pengakuan akan nilai historis simbol tersebut, yang berjalan berdampingan dengan perasaan bahwa simbol itu belum benar-benar berbicara untuk mereka.

Hafiz memahami bendera Aceh sebagai simbol perjuangan dan sejarah yang panjang, tetapi secara jujur mengakui bahwa ia belum merasakannya sebagai bagian dari dirinya:

"Saya paham kenapa bendera itu penting untuk orang Aceh, karena ada sejarah panjang. Tapi jujur, saya belum merasa itu mewakili Simeulue. Seperti simbol itu lebih cerita dari satu bagian Aceh saja."

(Hafiz, 23 tahun, mahasiswa)

Pengakuan Hafiz memperlihatkan dua hal yang berjalan bersamaan: pemahaman intelektual tentang makna simbol tersebut, dan jarak emosional yang ia rasakan karena simbol itu tidak tumbuh dari pengalaman komunitasnya sendiri. Bagi Siti Halimah, persoalannya lebih pada bagaimana identitas terbentuk sejak kecil:

"Bendera dan lagu Aceh itu saya hormati, tapi saya tidak merasa punya keterikatan yang dalam. Soalnya dari kecil kami tidak tumbuh dengan itu. Kami punya rasa Aceh, tapi beda bentuknya."

(Siti Halimah, 45 tahun, pedagang)

Kalimat "kami punya rasa Aceh, tapi beda bentuknya" adalah salah satu ungkapan paling bermakna dalam penelitian ini. Ia menunjukkan bahwa ke-Aceh-an tidak harus satu bentuk. Masyarakat Simeulue merasa menjadi bagian dari Aceh, tetapi cara mereka merasakannya tumbuh dari pengalaman yang berbeda dari laut, dari nandong, dari bahasa Devayan, bukan dari simbol yang dikonstruksi di pusat kota.

Hasan Basri mempertegas bahwa yang menjadi persoalan bukan simbol itu sendiri, melainkan keterwakilan di dalamnya:

"Kami ini orang Aceh juga. Tapi kalau bicara simbol, cerita kami jarang muncul. Jadi kami menghormati, tapi tetap merasa tidak di dalamnya."

(Hasan Basri, 39 tahun, ASN)

Sementara itu, Ridwan mengangkat dimensi lain dari simbol suara:

"Kalau hymne Aceh, saya tahu itu lagu penting. Tapi rasanya tidak terhubung secara emosional. Kami di Simeulue punya nyanyian sendiri, ritme sendiri."

(Ridwan, 41 tahun, guru)

Dari keseluruhan narasi tersebut, terlihat bahwa hubungan masyarakat Simeulue dengan simbol-simbol resmi ke-Aceh-an adalah hubungan yang penuh nuansa: menghormati tanpa merasa memiliki, mengakui tanpa merasa terwakili. Ini bukan sikap yang menolak atau melawan. Ini adalah sikap mereka yang hidup di

tepiian sebuah narasi besar memandangnya dengan hormat, tetapi sadar bahwa narasi itu belum menyertakan suara mereka secara penuh.

4.1.5 Solidaritas Komunitas Simeulue di Banda Aceh

Di tengah tantangan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda secara kultural, solidaritas sesama masyarakat Simeulue di Banda Aceh menjadi salah satu sumber kekuatan yang paling nyata. Solidaritas ini tidak hanya hadir dalam bentuk organisasi formal, tetapi justru paling kuat dalam praktik-praktik keseharian yang sederhana: saling berkunjung, memasak bersama, menggunakan bahasa daerah, dan berbagi cerita tentang kampung halaman.

Hafiz menceritakan bagaimana keberadaan sesama orang Simeulue membuat proses penyesuaian di Banda Aceh terasa lebih ringan:

"Saya masih sering kumpul sama teman-teman sesama orang Simeulue. Kami masak makanan khas, atau ngomong pakai bahasa Devayan. Itu bikin rasa kangen kampung agak hilang."

(Hafiz, 23 tahun, mahasiswa)

Solidaritas ini juga hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan terorganisir. Siti Halimah menjelaskan bagaimana komunitas Simeulue secara tidak tertulis telah membangun sistem saling membantu yang berfungsi khususnya bagi pendatang baru:

"Kalau ada orang dari kampung datang baru, kami bantu cari tempat tinggal, bantu kasih tahu kehidupan di sini. Itu sudah jadi kebiasaan kami."

(Siti Halimah, 45 tahun, pedagang)

Bagi Hasan Basri, solidaritas ini bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan mekanisme yang secara aktif mempertahankan identitas lokal dalam konteks yang lebih luas:

"Walaupun kami tinggal dan bekerja di Aceh, kami tetap merasa menjadi orang Simeulue dulu. Identitas kampung itu kuat karena kami minoritas di sini."

(Hasan Basri, 39 tahun, ASN)

Pernyataan Hasan Basri mengungkapkan sesuatu yang penting secara sosiologis: identitas lokal justru semakin menguat ketika seseorang berada dalam posisi minoritas. Rasa menjadi minoritas mendorong komunitas untuk lebih erat berpegangan pada identitas asalnya sebagai sumber rasa aman dan kebermaknaan. Dengan demikian, solidaritas komunitas Simeulue di Banda Aceh bukan hanya ekspresi keakraban, tetapi juga strategi mempertahankan jati diri di tengah lingkungan yang berbeda.

4.1.6 Memori Kolektif tentang Konflik dan Perdamaian

Bagi masyarakat Simeulue yang kini bermukim di Banda Aceh, perdamaian pasca MoU Helsinki bukan sekadar peristiwa politik yang dibaca di koran atau didengar dari orang lain. Bagi mereka yang hidup dalam masa konflik, perdamaian adalah perubahan suasana yang dirasakan langsung dalam tubuh dan keseharian dalam cara berjalan di jalan, dalam cara berbicara dengan orang asing, dalam cara merencanakan masa depan.

Ridwan, yang mengingat dengan jelas suasana sebelum damai, menggambarkan transformasi itu dengan cara yang sangat personal:

"Kalau dulu, sebelum damai, kita ke Banda Aceh itu ada rasa takut. Suasana nggak tenang. Tapi sekarang Aceh ini adem. Kita bisa sekolah, kerja, bangun hidup di sini tanpa rasa khawatir."

(Ridwan, 41 tahun, guru)

Kata "adem" yang digunakan Ridwan bukan sekadar kata sifat tentang suasana. Ia adalah ungkapan tentang rasa aman yang dulu tidak ada. Bagi generasi muda seperti Hafiz, perdamaian membawa makna yang lebih ke depan tentang kemungkinan dan kepemilikan:

"Damai itu bikin kita merasa Aceh ini punya kita semua. Bukan cuma satu daerah saja yang punya identitas. Kita dari Simeulue juga merasa bagian dari Aceh."

(Hafiz, 23 tahun, mahasiswa)

Fitriani, yang lahir di era konflik tetapi tumbuh besar di masa damai, melihat perdamaian sebagai kondisi yang memungkinkan berbagai identitas untuk hadir bersama tanpa perlu saling menutup:

"Kita tetap orang Simeulue, tapi tinggal di Aceh ini kita juga bagian dari ceritanya. Damai itu buat semua bisa hidup tanpa saling curiga."

(Fitriani, 22 tahun, mahasiswi)

Bagi Siti Halimah, perdamaian bermakna dalam hal yang paling konkret dan paling personal:

"Yang penting itu anak-anak bisa sekolah, bisa maju. Kalau Aceh damai, semua orang bisa hidup tenang. Itu yang kita syukuri."

(Siti Halimah, 45 tahun, pedagang)

Dari narasi-narasi ini terlihat bahwa memori tentang konflik dan pengalaman perdamaian menjadi bagian dari cara masyarakat Simeulue membangun hubungan emosional mereka dengan Aceh. Aceh bukan hanya tempat

tinggal yang kebetulan ia adalah ruang yang telah mereka ikut rasakan kesakitannya, dan kini ikut mereka nikmati kedamaiannya. Inilah yang menjadikan rasa memiliki mereka terhadap Aceh bersifat nyata, meski tidak selalu tercermin dalam simbol-simbol resminya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Konstruksi Identitas Aceh dalam Imajinasi Masyarakat Simeulue

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa masyarakat Simeulue di Banda Aceh membangun hubungan mereka dengan identitas Aceh melalui sebuah proses yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai imajinasi kolektif. Anderson menjelaskan bahwa komunitas pada dasarnya adalah sesuatu yang dibayangkan bersama bukan karena anggotanya saling mengenal, melainkan karena mereka berbagi imajinasi tentang kebersamaan itu melalui narasi, simbol, dan pengalaman yang dimiliki bersama.⁵⁴

Proses inilah yang terjadi pada masyarakat Simeulue di Banda Aceh. Mereka tidak membangun rasa ke-Aceh-an mereka melalui kesamaan bahasa atau ekspresi budaya dengan kelompok etnis lain di Aceh. Mereka membangunnya melalui kesamaan nilai keislaman yang kuat, penghormatan terhadap adat, dan sejarah perjuangan yang mereka yakini dimiliki bersama oleh semua orang Aceh. Inilah yang Anderson maksud dengan komunitas yang bersifat terbatas namun

⁵⁴Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2006), hlm. 6.

berdaulat⁵⁵ ia memiliki batas, tetapi batas itu bukan tembok yang menutup, melainkan cakrawala yang mendefinisikan ruang bersama.

Namun temuan penelitian ini juga memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks. Di satu sisi, masyarakat Simeulue membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas Aceh. Di sisi lain, imajinasi ke-Aceh-an yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari di Banda Aceh tidak sepenuhnya menyertakan mereka. Narasi identitas Aceh yang dominan yang tersimpan dalam bahasa, hymne, dan simbol resmi lebih banyak tumbuh dari pengalaman kelompok etnis tertentu yang telah lama menjadi pusat dari cerita tentang Aceh.

Kondisi ini menghasilkan apa yang bisa disebut sebagai imajinasi yang asimetris masyarakat Simeulue membayangkan Aceh sebagai komunitas yang menyertakan mereka, tetapi narasi komunitas itu sendiri belum sepenuhnya membalas imajinasi tersebut dengan representasi yang setara. Mereka ada dalam komunitas yang dibayangkan itu, tetapi berada di pinggiran imajinasi kolektifnya.

Dalam kerangka Anderson, hal ini berkaitan dengan cara sebuah komunitas diproduksi dan disebarluaskan.⁵⁶ Komunitas terbayangkan terbentuk bukan hanya melalui perasaan, tetapi juga melalui media, bahasa, dan institusi yang memproduksi narasi tentang siapa "kita". Ketika institusi-institusi tersebut secara dominan menggunakan bahasa dan simbol dari satu kelompok etnis, maka kelompok lain yang tidak memiliki akses yang sama terhadap alat-alat produksi

⁵⁵Ibid., hlm. 7.

⁵⁶Ibid., hlm. 145.

narasi itu secara alamiah akan berada pada posisi yang lebih perifer dalam imajinasi kolektif yang terbentuk.

Meski demikian, masyarakat Simeulue tidak pasif dalam situasi ini. Mereka secara aktif memproduksi imajinasi alternatif tentang ke Aceh-an sebuah ke Aceh-an yang lebih luas, lebih inklusif, dan berbasis nilai bersama, bukan keseragaman budaya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi objek dari narasi identitas yang ada, tetapi juga menjadi aktor yang menegosiasikan dan memperluas batas imajinasi kolektif tersebut.

Fenomena imajinasi asimetris ini tidak dipahami sebagai bentuk penolakan sosial atau rasisme struktural, melainkan sebagai implikasi dari proses sentralisasi narasi pascakonflik yang secara alami berpusat pada wilayah-wilayah episentrum sejarah tertentu. Masyarakat Simeulue di Banda Aceh tetap memegang teguh identitas ke-Aceh-an mereka melalui jembatan nilai-nilai universal seperti syariat Islam dan sejarah perjuangan bersama, yang membuktikan bahwa keterikatan mereka pada Aceh bersifat substantif, bukan sekadar simbolik.

4.2.2 Negosiasi Identitas dalam Kehidupan Sosial Aceh Pascakonflik

Jika bagian sebelumnya menjelaskan bagaimana identitas Aceh dibayangkan oleh masyarakat Simeulue, maka bagian ini membahas bagaimana identitas tersebut dinegosiasikan dalam praktik sosial sehari-hari. Hidup di Banda Aceh berarti hidup berdampingan dengan narasi dan simbol ke-Aceh-an yang tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman mereka. Dalam kondisi ini, negosiasi identitas menjadi sebuah keharusan bukan pilihan.

Anderson menunjukkan bahwa dalam sebuah komunitas terbayangkan, bahasa memainkan peran yang sangat sentral.⁵⁷ Bahasa adalah medium utama di mana imajinasi kolektif diproduksi dan disebarluaskan. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut terkonfirmasi dengan jelas: bahasa Aceh menjadi garis batas yang paling terasa dalam kehidupan sosial masyarakat Simeulue di Banda Aceh. Mereka yang tidak menguasainya seberapa lama pun mereka telah bermukim tetap ditempatkan di luar lingkaran keakraban yang paling dalam.

Namun negosiasi identitas yang dilakukan masyarakat Simeulue tidak berhenti pada persoalan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengembangkan cara-cara untuk tetap terlibat dalam komunitas yang lebih luas sambil mempertahankan identitas lokal mereka. Di ruang publik dan formal, mereka beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia dan mengikuti norma-norma sosial yang berlaku. Tetapi di ruang privat dan komunal, mereka menghidupkan kembali bahasa, tradisi, dan praktik budaya Simeulue yang menjadi sumber kekuatan identitas mereka.

Strategi ini mencerminkan kecerdasan sosial yang tumbuh dari pengalaman hidup sebagai kelompok minoritas kultural. Mereka tidak memilih antara menjadi orang Simeulue atau menjadi bagian dari Aceh. Mereka menjalani keduanya secara bersamaan, dengan cara yang berbeda tergantung pada konteks sosial yang mereka hadapi. Identitas bagi mereka bukan sesuatu yang tunggal dan kaku, melainkan sesuatu yang lentur dan responsif terhadap situasi.

⁵⁷Ibid., hlm. 44.

Konteks perdamaian pasca MoU Helsinki memberikan ruang yang lebih kondusif bagi proses negosiasi ini.⁵⁸ Dalam situasi konflik, perbedaan identitas bisa menjadi sumber ketegangan dan kecurigaan. Dalam situasi damai, perbedaan tersebut dapat dikelola dengan lebih terbuka. Masyarakat Simeulue di Banda Aceh memanfaatkan ruang ini untuk hadir secara lebih percaya diri sebagai bagian dari Aceh, sambil tetap mempertahankan kekhasan identitas lokal mereka.

Aspinall mencatat bahwa perdamaian Aceh membuka ruang bagi reinterpretasi identitas yang lebih inklusif.⁵⁹ Temuan penelitian ini memperkuat catatan tersebut dari sudut pandang kelompok etnis minoritas. Bagi masyarakat Simeulue, perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya perang ia adalah tentang kemungkinan untuk hidup sebagai diri sendiri di dalam sebuah komunitas yang lebih besar, tanpa harus memilih salah satu di antara dua identitas yang mereka miliki.

Pada akhirnya, negosiasi identitas yang dijalani masyarakat Simeulue di Banda Aceh adalah cermin dari dinamika yang lebih luas dalam masyarakat Aceh pascakonflik. Identitas Aceh sedang dalam proses redefinisi bukan lagi identitas yang ditentukan oleh satu kelompok etnis atau satu narasi tunggal, melainkan identitas yang terus dibentuk melalui dialog antara berbagai kelompok yang menjadi bagian darinya. Masyarakat Simeulue, dengan cara mereka memaknai dan

⁵⁸Ibid., hlm. 6.

⁵⁹Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (California: Stanford University Press, 2009), hlm. 3.

menegosiasikan posisi mereka, adalah bagian yang aktif dan nyata dari proses dialog tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa imajinasi tentang komunitas Aceh adalah imajinasi yang terus bergerak.⁶⁰ Ia tidak selesai pada satu titik, tidak berhenti pada satu kelompok. Setiap kelompok yang menjadi bagian dari Aceh termasuk masyarakat Simeulue turut serta dalam proses membayangkan dan membentuk komunitas tersebut, meskipun dengan cara dan dari posisi yang berbeda-beda. Dan justru dalam keberagaman posisi itulah,⁶¹ kekayaan sesungguhnya dari identitas Aceh yang sedang terbentuk dapat ditemukan.

4.2.3 Memperluas Anderson: Identitas Intra-Regional dan Batas Etnis dalam Komunitas Terbayangkan

Temuan-temuan yang telah dipaparkan di atas tidak hanya memperkuat teori komunitas terbayangkan Benedict Anderson, tetapi juga membuka ruang untuk mendialogkannya dengan dua kerangka teoritis yang relevan: konsep batas etnis Fredrik Barth dan konsep identitas kultural Stuart Hall. Dialog ini bukan sekadar ornamen akademis, melainkan lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan sesuatu yang temuan empiris tunjukkan tetapi kerangka Anderson sendiri belum sepenuhnya mampu mengakomodasi yakni mengapa seseorang seperti Siti

⁶⁰Anderson, *Imagined Communities*, hlm. 133.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 145.

Halimah, yang sudah hampir dua dekade bermukim di Banda Aceh, masih bisa merasa seperti “tamuh lama” di kota yang sudah lama menjadi rumahnya.⁶²

Barth menegaskan bahwa identitas etnis terbentuk bukan dari kesamaan isi kebudayaan semata, melainkan dari batas-batas yang secara aktif ditarik dan dijaga dalam interaksi antarkelompok.⁶³ Batas itu tidak harus bersifat kasar atau disadari oleh semua orang ia bisa bekerja secara halus, melalui penanda sosial yang hanya terasa ketika seseorang berada di posisi yang tidak memilikinya. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi argumen tersebut secara konkret: batas yang paling terasa dalam pengalaman masyarakat Simeulue di Banda Aceh bukan batas administratif atau geografis, melainkan batas simbolik yang terwujud dalam penguasaan bahasa Aceh. Ridwan, guru berusia 41 tahun yang sudah 15 tahun bermukim di Banda Aceh, merumuskan dinamika ini dengan cara yang sulit ditandingi oleh bahasa akademis:

"Identitas Aceh itu hasil dari sejarah panjang. Tapi seharusnya setelah damai, semua etnis di Aceh dilihat sama. Realitanya belum begitu. Kami dari pulau kadang masih seperti penonton."

(Ridwan, 41 tahun, guru)

Metafora “penonton” yang dipilih Ridwan mencerminkan persis apa yang Barth sebut sebagai posisi di luar garis batas: hadir di ruang yang sama, tetapi tidak memiliki akses penuh ke dalam lingkaran sosial yang paling dalam. Siti Halimah, pedagang berusia 45 tahun dengan 19 tahun pengalaman di Banda Aceh, merasakan

⁶²Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Boston: Little, Brown and Company, 1969), hlm. 9–10.

⁶³Ibid., hlm. 15.

hal yang serupa: “tapi kalau soal bahasa, tetap ada batas. Kita tetap kelihatan berbeda kalau tidak bisa bahasa Aceh.” Yang penting dicatat di sini dan ini justru memperluas argumen Barth adalah bahwa batas itu tidak ditentang secara frontal oleh siapapun. Ia adalah sesuatu yang “saling dimengerti,” sebuah tatanan simbolik yang dijalani dengan kesadaran penuh oleh semua pihak, dan justru karena itulah ia begitu bertahan lama bukan karena ada pihak yang memaksanya, melainkan karena ia tersemat dalam medium yang paling akrab dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Stuart Hall memberikan lensa yang berbeda namun saling melengkapi. Hall memahami identitas kultural bukan sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tinggal diwariskan, melainkan sebagai sesuatu yang selalu dalam proses produksi tidak pernah selesai, selalu berada dalam kondisi “menjadi” (becoming), bukan sekadar “ada” (being).⁶⁴ Perspektif ini sangat tepat untuk membaca strategi identitas yang dilakukan masyarakat Simeulue di Banda Aceh. Fitriani, mahasiswi berusia 22 tahun, menggambarkan bagaimana identitas Simeuluenya tidak ia bawa seperti barang bawaan yang tersimpan diam, melainkan ia produksi ulang setiap kali berkumpul bersama sesama warga asal “Kalau lagi kumpul sesama orang Simeulue, kami otomatis pakai bahasa [Devayan]. Rasanya kayak pulang ke rumah meski jauh dari kampung.” Hasan Basri, ASN berusia 39 tahun, menambahkan dimensi lain dari proses yang sama: “Walaupun kami tinggal dan bekerja di Aceh, kami tetap merasa menjadi orang Simeulue dulu. Identitas kampung itu kuat karena kami minoritas di sini.” Dua ungkapan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa identitas

⁶⁴Stuart Hall, “Cultural Identity,” dalam Jonathan Rutherford (ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart, 1990), hlm. 222–225.

Simeulue bukan sekadar dipertahankan ia secara aktif diproduksi ulang dalam konteks baru, melalui bahasa Devayan di kos-kosan, melalui tradisi nandong yang dinyanyikan jauh dari pantai Simeulue, dan melalui cara memperkenalkan diri yang selalu menyertakan dua nama sekaligus: orang Aceh dan orang Simeulue. Inilah yang Hall maksud dengan identitas sebagai proses ia hidup justru karena terus diulang dan diperbarui.

Di titik inilah dua kerangka teoritis ini bertemu dan bersama-sama membuka celah dalam teori Anderson yang perlu dicermati. Anderson membangun konsep komunitas terbayangkan di atas premis yang mengasumsikan horizontalitas semua anggota komunitas membayangkan diri setara dalam komunitas yang sama, diikat oleh imajinasi kebersamaan yang mengalir secara simetris.⁶⁵ Namun temuan penelitian ini memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Masyarakat Simeulue di Banda Aceh membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas Aceh dan imajinasi itu nyata, tulus, dan bersumber dari kesamaan nilai keislaman dan sejarah kolektif. Tetapi narasi Aceh yang dominan yang terwujud dalam bahasa hymne, simbol bendera, dan ekspresi budaya resmi belum sepenuhnya membalas imajinasi tersebut dengan representasi yang setara. Seperti yang dikatakan Hafiz, mahasiswa berusia 23 tahun: “Kami yang dari Simeulue juga bagian dari Aceh, walau budaya dan bahasa kita beda.” Pernyataan ini mengandung sebuah paradoks yang khas: pengakuan penuh terhadap ke-Aceh-an, disertai kesadaran bahwa ke-Aceh-an itu diukur dengan penanda yang tidak tumbuh dari pengalaman komunitasnya sendiri.

⁶⁵Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2006), hlm. 7.

Kondisi inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai imajinasi asimetris sebuah kondisi di mana komunitas terbayangkan tidak bersifat horizontal dan setara, melainkan mengandung hierarki simbolik internal yang bekerja secara halus dan tidak selalu disadari. Kelompok yang posisinya lebih perifer dalam narasi identitas dominan seperti masyarakat Simeulue tetap mampu membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas tersebut. Namun imajinasi mereka tidak dibalas dengan representasi yang setara dalam medium-medium yang memproduksi narasi bersama: bahasa resmi, simbol daerah, dan himne.⁶⁶ Konsep imajinasi asimetris ini bukan kritik yang membatalkan teori Anderson, melainkan perluasan yang lahir dari pengujian empirisnya pada konteks yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya: komunitas sub-nasional yang majemuk secara etnis dalam fase rekonstruksi identitas pascakonflik. Dengan menghadirkan konsep ini, penelitian ini membuka arah diskusi yang lebih luas tentang bagaimana keberagaman internal suatu daerah dapat dipahami bukan sebagai sumber fragmentasi, melainkan sebagai kenyataan yang memerlukan narasi yang cukup lapang untuk menampung semua suara yang ada di dalamnya.

⁶⁶Ibid., hlm. 6–7.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan yang sederhana namun menyimpan kedalaman yang nyata bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri mereka dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki? Setelah menelusuri pengalaman 15 informan melalui wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut tidak bisa disederhanakan dalam satu kalimat karena yang terjadi di lapangan jauh lebih berlapis, lebih hidup, dan lebih bermakna dari sekadar persoalan penerimaan atau penolakan identitas.

Temuan pertama dan paling mendasar adalah bahwa masyarakat Simeulue di Banda Aceh membayangkan diri mereka sebagai bagian dari komunitas Aceh, tetapi tidak melalui kesamaan bahasa atau simbol budaya melainkan melalui kesamaan nilai. Nilai keislaman, penghormatan terhadap adat, dan rasa sepenanggungan dalam sejarah panjang Aceh menjadi fondasi yang mereka gunakan untuk membangun rasa ke-Aceh-an mereka. Dalam kerangka teori komunitas terbayangkan Benedict Anderson, proses ini menunjukkan bahwa

sebuah komunitas tidak terbentuk karena anggotanya saling mengenal atau berbagi bahasa yang sama, melainkan karena mereka berbagi imajinasi tentang kebersamaan itu.⁶⁷

Temuan kedua adalah bahwa imajinasi tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang setara. Narasi ke-Aceh-an yang dominan yang terwujud dalam bahasa, hymne, dan simbol-simbol resmi daerah lebih banyak mencerminkan pengalaman kelompok etnis tertentu, sehingga masyarakat Simeulue berada dalam posisi yang mereka sendiri gambarkan sebagai "tamuh lama" atau "penonton". Mereka hadir, mereka diakui, tetapi belum sepenuhnya terwakili dalam narasi identitas yang sedang dibangun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunitas terbayangkan tidak selalu bersifat simetris⁶⁸ ada kelompok yang suaranya lebih dominan dalam membentuk imajinasi kolektif, dan ada yang masih berdiri di tepinya.

Temuan ketiga adalah bahwa masyarakat Simeulue tidak pasif dalam menghadapi posisi tersebut. Mereka menegosiasikan identitas mereka secara aktif melalui dua cara yang berjalan bersamaan. Di ruang publik, mereka beradaptasi dengan norma sosial yang berlaku, menggunakan bahasa Indonesia sebagai jembatan, dan terlibat dalam kehidupan sosial Banda Aceh. Di ruang privat dan komunal, mereka menghidupkan kembali bahasa Devayan dan Sigulai, tradisi nandong, dan praktik gotong royong khas Simeulue sebagai cara mempertahankan

⁶⁷Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi revisi (London: Verso, 2006), hlm. 6.

⁶⁸Ibid., hlm. 7.

jati diri. Strategi ini mencerminkan kecerdasan sosial yang tumbuh dari pengalaman hidup sebagai kelompok minoritas kultural dalam masyarakat yang majemuk.

Temuan keempat berkaitan dengan peran perdamaian pasca MoU Helsinki dalam membentuk konteks negosiasi identitas ini. Bagi masyarakat Simeulue, perdamaian bukan hanya peristiwa politik ia adalah perubahan suasana hidup yang nyata. Perdamaian membuka ruang bagi mereka untuk hadir lebih percaya diri di Banda Aceh, untuk merencanakan masa depan tanpa kecemasan, dan untuk merasa bahwa Aceh adalah rumah bersama yang bisa mereka huni sepenuhnya bukan sekadar tempat singgah sementara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa identitas Aceh pasca MoU Helsinki adalah identitas yang sedang bergerak tidak selesai, tidak tunggal, dan tidak bisa didefinisikan oleh satu kelompok saja. Masyarakat Simeulue di Banda Aceh, dengan cara mereka memaknai, merasakan, dan menegosiasikan posisi mereka, adalah bukti nyata bahwa ke-Aceh-an hari ini adalah hasil dari dialog yang terus berlangsung antara berbagai kelompok yang menjadi bagian darinya.⁶⁹

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep komunitas terbayangkan Anderson dalam konteks lokal pascakonflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa imajinasi kolektif tentang identitas daerah tidak hanya berlangsung di level nasional, tetapi juga di level intra-daerah di mana kelompok minoritas kultural turut serta membayangkan dan membentuk makna identitas bersama, meskipun dari posisi yang tidak selalu setara. Temuan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana keberagaman internal

⁶⁹Ibid., hlm. 6.

suatu daerah dapat menjadi kekuatan, bukan sekadar tantangan, dalam proses rekonstruksi identitas pascakonflik. Secara lebih spesifik, penelitian ini memperkenalkan konsep imajinasi asimetris sebagai perluasan kritis terhadap teori Anderson: sebuah kondisi di mana komunitas terbayangkan tidak bersifat horizontal dan setara sebagaimana yang Anderson asumsikan, melainkan mengandung hierarki simbolik internal di dalamnya. Kelompok-kelompok yang posisinya lebih perifer dalam narasi identitas yang dominan tetap mampu membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas tersebut, namun imajinasi mereka tidak dibalas dengan representasi yang setara dalam medium-medium yang memproduksi narasi bersama, seperti bahasa resmi, simbol daerah, dan himne. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kajian Aceh, tetapi juga bagi kajian identitas daerah di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman etnis intra-regional serupa.

1.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

5.2.1 Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini baru menyentuh pengalaman satu kelompok etnis dalam memaknai identitas ke-Aceh-an dari satu kota. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan pengalaman kelompok etnis minoritas lain di Aceh, seperti Gayo, Alas, atau Singkil, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika identitas internal Aceh pascakonflik. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji generasi muda masyarakat Simeulue yang lahir

dan tumbuh besar di era damai untuk memahami bagaimana memori tentang konflik membentuk atau tidak membentuk cara mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Aceh.

5.2.2 Saran bagi pemerintah daerah Aceh

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa simbol-simbol resmi ke-Aceh-an seperti hymne dan bendera belum sepenuhnya dirasakan sebagai milik bersama oleh seluruh kelompok etnis di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendekatan kebudayaan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan identitas daerah kebijakan yang mengakui dan merayakan keberagaman etnis internal Aceh, bukan hanya keberagaman dalam pengertian formal. Program kebudayaan, pendidikan, dan media lokal perlu memberi ruang yang lebih proporsional bagi ekspresi budaya kelompok etnis kepulauan seperti Simeulue agar mereka merasa benar-benar menjadi bagian dari cerita Aceh.

5.2.3 Saran bagi masyarakat Simeulue

Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas lokal Simeulue adalah kekuatan, bukan hambatan. Bahasa Devayan dan Sigulai, tradisi nandong, dan nilai-nilai gotong royong yang dijaga oleh komunitas Simeulue di Banda Aceh adalah aset budaya yang perlu terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda. Masyarakat Simeulue di perantauan dapat berperan aktif dalam mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga kehadiran mereka di Banda Aceh bukan hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya keberagaman Aceh secara keseluruhan.

5.2.4 Saran bagi masyarakat Aceh secara umum

Perdamaian yang telah dicapai Aceh adalah pencapaian luar biasa yang diperjuangkan dengan harga yang sangat mahal. Menjaga perdamaian itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa ke-Aceh-an bukan milik satu kelompok etnis ia adalah milik semua orang yang hidup, bekerja, dan membangun harapan di tanah Aceh, termasuk mereka yang datang dari Simeulue, dari Gayo, dari Alas, dan dari berbagai penjuru kepulauan yang menjadi bagian dari provinsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., dkk. (2010). *Selama kite senlambat: Adat Simeulue dalam perspektif budaya dan hukum*. Syiah Kuala University Press.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (edisi revisi). Verso.
- Aspinall, E. (2005). *The Helsinki agreement: A more promising basis for peace in Aceh?* East-West Center.
- Aspinall, E. (2009). *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Avonius, L., & Shadiqin, S. I. (Ed.). (2010). *Adat dalam dinamika politik Aceh*. ICAIOS.
- Bustamam-Ahmad, K. (2007). *Islamic law in contemporary Southeast Asia: A study of the implementation of Shari'ah in Aceh*. AK Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukma, R. (2004). *Security operations in Aceh: Goals, consequences and lessons*. East-West Center.
- Aini, N. (2011). Smong: Kearifan lokal masyarakat Simeulue dalam menghadapi bencana tsunami. *Jurnal Disaster Risiko Bencana*, 2(1), 13.
- Amalia Sari, O., Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2022). Pertentangan etnis minoritas terhadap agenda politik identitas elite pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: The political economy of peace in Aceh. *Indonesia*, (87), 1–34.

- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Little, Brown and Company.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 79–101.
- Hall, S. (1990). Cultural identity. Dalam J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference* (hlm. 222–237). Lawrence & Wishart.
- Harnita, P. C., Hergianasari, P., Ahmad, J., & Sari, D. K. (2019). A critical narrative of the Anderson theory of imagined community: An Indonesian perspective. *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications (IJMJMC)*, 5(3), 45–51. <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0503005>
- Ishak, S. (2014). Keberagaman etnis di Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 22–23.
- Ismail, S., Abubakar, B., Hasbullah, & Aiyub, A. (2020). Nandong: Tradisi lisan masyarakat Simeulue. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(1).
- Ju Lan, T. (2005). Redefinisi etnisitas dalam konteks kebudayaan nasional. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.14203/jmb.v8i1.184>
- Lubis, Z. (2005). Identitas etnis: Sebuah kajian awal. *Jurnal Antropologi Indonesia*, (76), 1–10.
- Mujib, I., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2013). 'Islam' in the global village: Post-tsunami dialog and negotiation of Aceh identity. *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies (BJRS)*, 2(2), 4.
- Nauli, R., Sucipto, F. D., & Yuda, R. (2024). Perancangan maskot sebagai identitas pariwisata Simeulue. *Jurnal Desain Komunikasi Visual ISBI Aceh*, 6(1), 49–53.

- Putri, I. P., Nasruddin, E., & Wahab, J. A. (2018). Imagined communities and the construction of national identity. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(7), 565–572. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i7/4399>
- Sulistiyani, A. T., & Zulfa, M. T. (2023). Smong: Kearifan lokal sebagai bentuk warisan budaya mitigasi bencana masyarakat Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 4(2). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7406>
- Monita, E. (2018). *Kesadaran identitas kesukuan dalam masyarakat Simeulue Timur* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Muchlis. (2017). *The struggle of Bintang Bulan flag: Symbolic domination and political negotiation in post-conflict Aceh* [Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Mujib, I. (2014). *Konstruksi identitas keacehan pasca konflik dan tsunami: Relasi masyarakat, negara, dan pasar dalam kebangkitan lokal di Banda Aceh* [Disertasi S3, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta].
- Ningsih. (2020). *Negosiasi identitas etnis Minang di Banda Aceh* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Pratama, D. (2025). *Stereotip masyarakat terhadap budaya Simeulue di asrama mahasiswa Kota Banda Aceh* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue. (2023). *Simeulue dalam angka 2023*. BPS Simeulue.
- Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. (2005, 15 Agustus). Helsinki.
- Pemerintah Aceh. (2013). *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*. Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

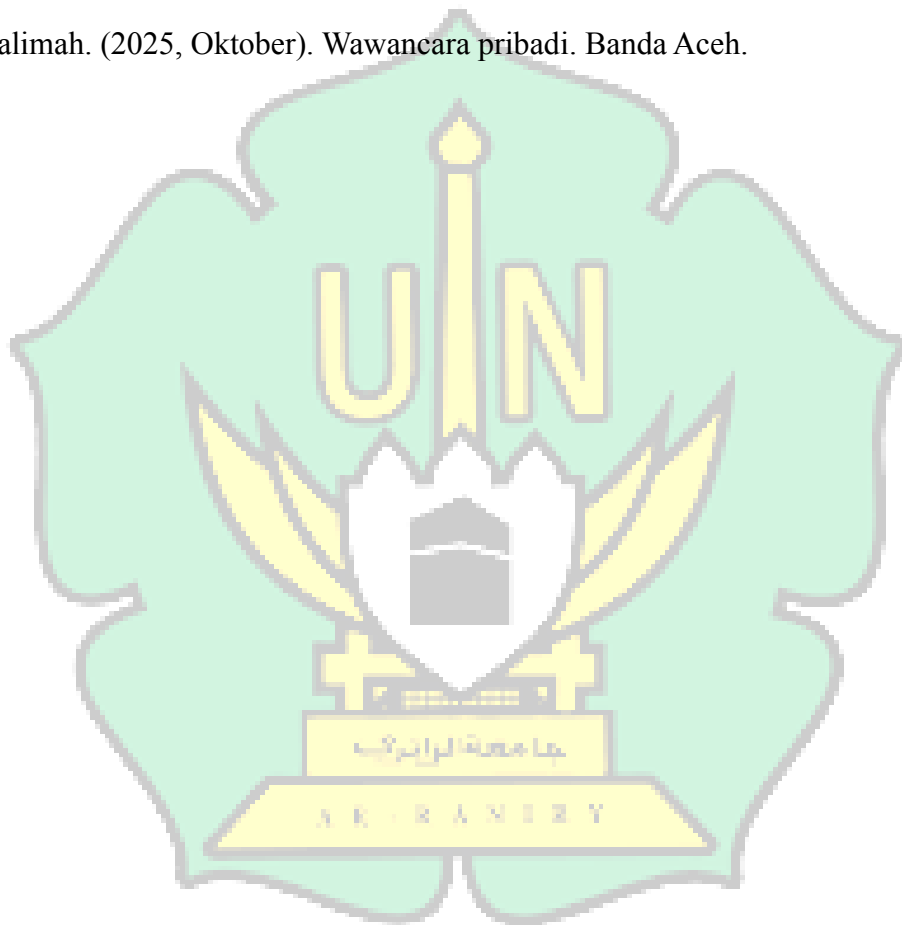
Fitriani. (2025, Oktober). Wawancara pribadi. Banda Aceh.

Hafiz. (2025, Oktober). Wawancara pribadi. Banda Aceh.

Hasan Basri. (2025, Oktober). Wawancara pribadi. Banda Aceh.


Ridwan. (2025, November). Wawancara pribadi. Banda Aceh.

Siti Halimah. (2025, Oktober). Wawancara pribadi. Banda Aceh.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Surat Keputusan dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Pembimbing skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2900/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **21 Oktober 2025**


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Muhammad Thalal, Lc., M.SI., M.Ed.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Arnita**
NIM : **220801047**
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Identitas Aceh dalam Imajinasi Diaspora Lokal: Studi Masyarakat Simeulue Di Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 November 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,
MUJI MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2978/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220801047

Nama : ARNILA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jln.batu berlayar km 21 Fano jaya Lagundi

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***IDENTITAS ACEH DALAM IMAJINASI DIASPORA LOKAL: STUDI MASYARAKAT SIMEULUE DI BANDA ACEH***

Banda Aceh, 20 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 27 Februari 2026

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Bagaimana masyarakat Simeulue di Banda Aceh memaknai dan menempatkan diri mereka dalam narasi identitas Aceh yang dibangun pasca MoU Helsinki?”. Berikut daftar pertanyaan wawancara penelitian:

Pemaknaan Identitas Aceh

Tema ini bertujuan menggali bagaimana informan mendefinisikan dan merasakan identitas ke-Aceh-an secara pribadi, serta sejauh mana mereka merasa menjadi bagian dari komunitas Aceh.

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa yang dimaksud dengan “orang Aceh”? Nilai atau ciri apa yang paling mencerminkan ke Aceh-an menurut Anda?
2. Apakah Anda merasa menjadi bagian dari masyarakat Aceh? Dalam situasi seperti apa perasaan itu paling kuat atau justru paling lemah terasa?
3. Apakah ada perbedaan antara identitas Anda sebagai orang Simeulue dan identitas Anda sebagai bagian dari Aceh? Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan itu dalam keseharian?
4. Pernahkah Anda merasa ada jarak atau perbedaan antara diri Anda dengan masyarakat Aceh di sini? Bisa diceritakan situasi yang paling berkesan?

Bahasa sebagai Ruang Adaptasi dan Negosiasi Identitas

Tema ini bertujuan menggali pengalaman informan terkait penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari di Banda Aceh, baik bahasa Aceh sebagai bahasa dominan di lingkungan sosial mereka, maupun bahasa Simeulue sebagai bahasa identitas komunal mereka.

1. Bahasa apa yang paling sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari di Banda Aceh? Bagaimana Anda menyesuaikan pilihan bahasa tergantung pada situasi atau lawan bicara?

2. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana ketidakmampuan berbahasa Aceh membuat Anda merasa berbeda atau “orang luar” dalam suatu lingkungan sosial? Bagaimana perasaan Anda saat itu?
3. Seberapa penting bahasa Simeulue bagi Anda selama tinggal di Banda Aceh? Dalam situasi apa Anda masih menggunakannya, dan apa artinya secara emosional bagi Anda
4. Menurut Anda, apakah bahasa Aceh menjadi syarat tidak tertulis untuk diterima sebagai bagian dari komunitas di sini? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?

Praktik Keagamaan dan Adat sebagai Jembatan Identitas

Tema ini bertujuan menggali bagaimana agama dan praktik adat berperan dalam membentuk dan mempertemukan identitas masyarakat Simeulue dengan komunitas Aceh yang lebih luas, sekaligus sebagai cara mempertahankan kekhasan budaya Simeulue.

1. Bagaimana peran agama Islam dalam kehidupan Anda sehari-hari di Banda Aceh? Apakah agama membuat Anda merasa lebih dekat atau lebih sama dengan masyarakat Aceh di sini?
2. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan antara suasana keagamaan seperti di masjid atau acara kenduri dengan suasana pergaulan sosial sehari-hari? Bisa Anda ceritakan?
3. Apakah Anda masih menjalankan tradisi atau adat Simeulue selama tinggal di Banda Aceh, seperti nandong atau masakan khas kampung? Apa artinya bagi Anda?
4. Bagaimana cara Anda menjaga adat dan budaya Simeulue di tengah kehidupan di Banda Aceh yang berbeda secara kultural? Apakah hal itu terasa penting untuk dipertahankan?

Pandangan terhadap Simbol-Simbol Resmi Ke Aceh-an

Tema ini bertujuan menggali bagaimana informan merespons simbol-simbol resmi ke-Aceh-an, khususnya bendera bulan bintang dan hymne Aceh, serta

sejauh mana simbol-simbol tersebut dirasakan mewakili seluruh kelompok etnis di Aceh termasuk masyarakat Simeulue.

1. Apa yang ada di benak Anda ketika melihat bendera Aceh (bendera bulan bintang)? Apakah Anda merasa simbol itu juga mewakili Simeulue?
2. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar atau menyanyikan hymne Aceh yang menggunakan bahasa Aceh? Apakah Anda merasa terhubung secara emosional dengan lagu itu?
3. Apakah Anda merasa simbol-simbol resmi ke-Aceh-an seperti bendera, hymne, dan lambang daerah sudah mencerminkan semua etnis yang ada di Aceh, termasuk Simeulue? Mengapa demikian?
4. Jika Anda bisa menambahkan satu hal dari budaya Simeulue ke dalam simbol atau narasi resmi ke-Aceh-an, apa yang ingin Anda tambahkan dan mengapa?

Solidaritas Komunitas Simeulue di Banda Aceh

Tema ini bertujuan menggali bagaimana jaringan solidaritas sesama orang Simeulue di Banda Aceh terbentuk, bagaimana ia berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan apa perannya dalam mempertahankan identitas lokal mereka di lingkungan baru.

1. Apakah Anda memiliki komunitas atau jaringan sesama orang Simeulue di Banda Aceh? Bagaimana komunitas itu terbentuk dan apa yang biasanya kalian lakukan bersama?
2. Seberapa penting bagi Anda untuk tetap berhubungan dekat dengan sesama orang Simeulue selama di Banda Aceh? Apa yang akan berbeda jika komunitas itu tidak ada?
3. Ketika ada orang dari Simeulue yang baru datang ke Banda Aceh, adakah bentuk bantuan atau sambutan yang biasa dilakukan sesama komunitas? Bagaimana itu berlangsung?

4. Menurut Anda, apakah keberadaan sebagai kelompok minoritas di Banda Aceh justru memperkuat rasa ke Simeulue-an Anda? Bisa Anda jelaskan mengapa?

Memori Kolektif tentang Konflik dan Perdamaian

Tema ini bertujuan menggali bagaimana memori tentang masa konflik bersenjata dan pengalaman perdamaian pasca MoU Helsinki membentuk cara informan memaknai Aceh sebagai tempat tinggal dan sebagai komunitas yang mereka rasakan sebagai bagian dari mereka.

1. Bagaimana Anda mengingat suasana Banda Aceh sebelum dan setelah perdamaian MoU Helsinki 2005? Apa perbedaan yang paling Anda rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari
2. Apa arti perdamaian bagi Anda secara pribadi sebagai orang Simeulue yang tinggal di Banda Aceh? Apakah perdamaian mengubah cara Anda memandang Aceh sebagai rumah
3. Apakah pengalaman konflik dan perdamaian yang Anda rasakan memengaruhi rasa memiliki Anda terhadap Aceh? Ceritakan bagaimana perasaan itu berkembang dari waktu ke waktu.
4. Menurut Anda, apakah perdamaian Aceh sudah benar-benar memberi ruang yang setara bagi semua kelompok etnis di Aceh, termasuk masyarakat dari kepulauan seperti Simeulue? Apa yang masih perlu berubah?

Pertanyaan-pertanyaan di atas bersifat panduan dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti sesuai arah percakapan yang berkembang dengan masing-masing informan. Dalam wawancara semi-terstruktur, kualitas data tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan pertanyaan yang ditanyakan, melainkan oleh kedalaman eksplorasi yang dilakukan peneliti terhadap setiap respons yang diberikan informan.